

SEMILINER
ONLINE
Zoom

PENINGKATAN PELAYANAN DI KEPULAUAN SERIBU **Kamis, 23 Desember 2021**
Jam 13.00 – 17.00 WIB
Meeting ID: 826 8745 8387
Passcode: DRDKOM1

Sambutan:
Prof. Ir. Kemas Ridwan Kurniawan, M.Sc., Ph.D
(Ketua DRD DKI Jakarta)

Junoedi, S. Sos. M. Si.
(Bupati Kepulauan Seribu)

Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
(Anggota DRD DKI Jakarta)

Dr. AH Rahadian
(Dosen Pascasarjana Institut Sains Jakarta)

Moderator:
Drs Teguh Imam Persana, M.Si

Wrap Up & Penutup :
Dr. Drs. Irelli Samudharmo, M.Def.Stud.
Ketua Komisi 1 DRD DKI Jakarta

NARAHUBUNG
Dr. Ing. Widodo
Setyo Pranowo (08211637144)
Resista Vikaliano (081296244431)

Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu

Seminar Online 23 Desember 2021

LAPORAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

**SEMINAR ONLINE (WEBMINAR) PENINGKATAN
PELAYANAN DI KEPULAUAN SERIBU
PADA 23 DESEMBER 2021**



Oleh:

KOMISI 1

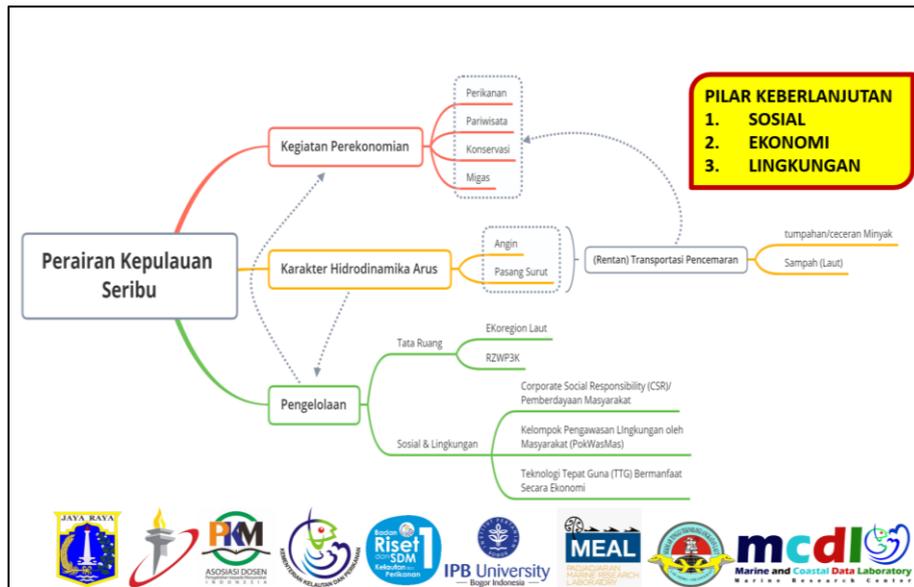
DEWAN RISET DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

JAKARTA, 31 DESEMBER 2021

PENDAHULUAN

Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta periode 2018-2022 pada Tahun Anggaran 2020 telah sukses menyelenggarakan SEMINAR ONLINE bertajuk “Kolaborasi Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dosen Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Seribu” yang dilaksanakan pada 23 Desember 2020. Bupati Kepulauan Seribu, Bapak Junaedi S.Sos, MSi, pada Seminar Online tersebut menyampaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu yang bisa dikatakan masih tertinggal, dibandingkan dengan masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta secara umum. Ada banyak permasalahan yang terjadi di Kepulauan Seribu, baik isu lingkungan, sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut, menurut Heru Susetyo, S.H., L.L.M, Ph.D selaku anggota Komisi I DRD, merupakan suatu tantangan dan sekaligus peluang bagi DRD dan para kolaboratornya untuk berusaha membangun ekosistem kebijakan yang dapat dipergunakan guna percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu, melalui pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi, harus didasarkan kepada potensi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam laut dan pesisir, serta mempertimbangkan adanya kerentanan dari pencemaran, seperti yang dipaparkan oleh Dr.-Ing. Widodo S. Pranowo yang salah satu anggota Komisi I DRD DKI Jakarta. Pembangunan lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu, tidak bisa hanya dikerjakan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Seribu saja, melainkan perlu dukungan kolaborasi berbagai pihak, salah satunya adalah Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Indonesia (ADPI) cabang DKI Jakarta, seperti yang disampaikan oleh Dr. Nur Aini selaku Bendahara ADPI dan Dosen ITB Ahmad Dahlan. Resume dan rekomendasi dari seminar online tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Resume dan rekomendasi dari Seminar Online DRD DKI Jakarta pada 23 Desember 2020

Berdasarkan capaian SEMINAR ONLINE pada tahun 2020 tersebut, maka ditindaklanjuti dengan SEMINAR ONLINE (WEBMINAR) lanjutan untuk menajamkan pembahasan salah satu aspek yang penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. Seminar online (Webminar) lanjutan tersebut diselenggarakan pada 23 Desember 2021 membahas tentang “Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu”.

MAKSUD DAN TUJUAN

Seminar online (Webminar) tentang “Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu” memiliki fungsi yang sangat strategis antara lain: sebagai media pengumpul data dan informasi dari narasumber yang terpercaya; sebagai media diskusi publik yang terakuntabilitas; sebagai salah satu media diskusi ilmiah dalam rangka proses penyusunan Policy Brief di masa mendatang, yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan juga sebagai media *public outreach* hasil riset DRD DKI Jakarta kepada masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Menyelenggarakan Seminar Online (Webminar) tentang Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu.

2. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan Seminar Online (Webminar) tersebut sebagai salah satu bahan masukan untuk penyusunan Policy Brief Besar yang sedang disusun oleh DRD DKI Jakarta tentang kebijakan pembangunan lingkungan-sosial-ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu.

NARASUMBER DAN TOPIK YANG DIPAPARKAN

Narasumber pada seminar online tersebut adalah:

1. Bapak Bupati Administratif Kepulauan Seribu, Bapak. JUNAEDI, S.Sos, M.Si, yang memaparkan kondisi terkini Kepulauan Seribu, dan perkembangan terkini berbagai fasilitas pelayanan public yang tekah dibangun untuk kesejahteraan masyarakat dan Penanaman Modal.
2. Bapak Dr. H. Dadang Soliin, SE., MA, selaku anggota DRD DKI Jakarta yang memaparkan konsep pembangunan masyarakat digital yang cocok diterapkan di Kepulauan Seribu.
3. Bapak Dr. Ahmad Hidayat Rahadian, Dosen Magister di Institut STIAMI yang pernah melakukan penelitian tentang pelayanan terpadu sistem satu pintu di wilayah Jakarta Utara, yang mungkin bisa dijadikan *lesson learned* untuk peningkatan pelayanan public dan penanaman modal untuk kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Seribu.

PESERTA YANG DIUNDANG DAN HADIR

Adapun sejumlah 28 peserta Seminar Online (Webminar) yang diundang, dan hadir 40 peserta yang terdiri dari masyarakat umum, LSM, peneliti, akademisi yang memiliki perhatian positif kepada Kepulauan Seribu; staf pemangku kebijakan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta dan kabupaten Kepulauan Seribu.

JADUAL YANG TELAH DILAKSANAKAN

Seminar Online (Webminar) telah dilaksanakan dengan sukses dan lancar pada 23 Desember 2021 dengan jadwal sebagai berikut:

WAKTU [WIB]	KEGIATAN	PIC/NARASUMBER
13:00 – 13:15	Peserta dan Narasumber memasuki waiting room zoom yang terpisah.	MC: Dr. Widodo Pranowo
13:15 – 13:20	Peserta dan Narasumber memasuki main room zoom seminar online.	Moderator: Drs. H. Teguh Iman Perdana, MIP
13:20 – 13:25	Kalimat pengantar	Dr. Widodo Pranowo
13:25 – 13:30	Sekapur sirih	Dr. Drs. Isroil Samihardjo (Ketua Komisi I DRD DKI Jakarta)
13:30 – 13:40	Sambutan dari Ketua DRD DKI Jakarta	Prof. Dr. Ir. Kemas Ridwan, M.Sc (Ketua Umum DRD DKI Jakarta)
13:40 - 14:40	Sambutan dan paparan dari Bupati Kepulauan Seribu	Bapak. JUNAEDI, S.Sos, M.Si
14:40 – 15:00	Digital Islands	Bapak Dr. H. Dadang Solihin (Anggota DRD DKI Jakarta)
15:00 – 15:30	Pelayanan Publik/Penenaman Modal di Kepulauan Seribu ditinjau secara akademis	Bapak Dr. A.H. Rahadian (Dosen S2 Institut STIAM I)
15:30 – 16:00	Diskusi	Moderator: Drs. H. Teguh Iman Perdana, MIP
16:00 – 16:30	Wrap Up dan Penutup	Dr. Drs. Isroil Samihardjo (Ketua Komisi I DRD DKI Jakarta)

RINGKASAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan paparan seluruh narasumber dan hasil diskusi selama Seminar Online (Webminar) yang telah dilaksanakan dengan sukses dan lancar pada 23 Desember 2021, maka didapatkan butir-butir penting sebagai ringkasan dan rekomendasi sebagai berikut:

Modal pembangunan yang dimiliki oleh Kepulauan Seribu antara lain: Kepulauan Seribu memiliki 113 Pulau, terdiri dari 6 Kelurahan, 2 Kecamatan, ada taman nasional, 6 zona pulau RDTR, dan Zona Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat. Luas daratannya lebih sedikit daripada luas lautnya. Dari luas totalnya 7.006,48 km², luas daratan 9,98 km², dan luas lautnya sekitar 10xluas daratan kota Jakarta. Lahan darat yang sedikit ini menjadi kendala pengembangan/pembangunan infrastruktur untuk peningkatan ekonomi. Kepulauan Seribu sebelum tahun 2020 sudah ada pembangunan oleh KemenPUPR untuk mendukung program

pariwisata nasional, namun setelah tahun 2020 agak terhambat kemungkinan karena adanya Pandemi Covid19.

Tantangan yang dihadapi di Kepulauan Seribu antara lain: Pengangguran tinggi menyebabkan penduduknya termiskin. Infrastruktur/fasilitas yang dikembangkan untuk mengakomodir kunjungan wisata. Pengelolaan dan pengolahan sampah yang masih harus ditangani di daratan pulau, terkendala tidak terangkut oleh kapal pengangkut sampah ketika musim angin barat yang sering terjadi gelombang tinggi. Beberapa Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) telah dibangun, dan masih perlu ditambah. Masih memerlukan sistem peringatan dini bencana: puting beliung dan tsunami. Masih diperlukan upaya perubahan mindset untuk mengejar ketertinggalan 20 tahun (merasa tidak maju-maju). Sudah ada Grand Design dan Investor (konsorsium) yang siap membangun (Pak Bupati: “sayang bila tidak direalisasikan”) menjadi Regulasi. Terkait KEK, sudah ditangani oleh Deputy Pengembangan Menko Ekonomi, dan akan disurvei apakah bisa menjadi KEK. Pendidikan tertinggal di Kep. Seribu SLTA untuk dibuka suatu Perguruan Tinggi (yang bisa dijajagi untuk bekerjasama dengan pesantren).

Adapun peningkatan pelayanan di Kepulauan Seribu yang telah dilakukan antara lain: Kebutuhan akan listrik bagi penduduk di pulau terjauh telah bertahap dipenuhi. Bekerjasama dengan Pertamina membangun Kampung Jepang, dimana sudah ditanami Pohon Bunga Sakura yang asli dari Jepang di Pantai Sakura. Kemudian juga telah membangun beberapa pantai ikonik untuk wisatawan, seperti Pantai Sunrise, Wisata Religi, dan lain sebagainya dan rencana kedepannya akan diikuti lomba/kompetisi. Kepulauan Seribu juga sudah memiliki lagu ikonik untuk menarik wisatawan yang berjudul “Pulau Seribu” yang dinyanyikan oleh Tony Q. Rastafara, bisa dinikmati melalui tautan youtube <https://www.youtube.com/watch?v=ASxYAiEUibw> .

Sedangkan peningkatan yang masih perlu dilakukan adalah: Kepulauan Seribu perlu menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsep “Digital Island”, mengadopsi negara “Maladewa”, yakni meningkatkan berbagai akses produk dan layanan yang berbasis perbankan digital di Kepulauan Seribu yang bisa menciptakan banyak lapangan kerja. Pengembangan metodologi pemerintahan dengan “Smart Government” dimana mengimplementasikan ICT pada layanan di bidang pemerintahan secara efektif dengan cara menyediakan “One Stop Services”. Dilakukan penyusunan “roadmap” bagaimana dan kapan secara bertahap menuju ke arah “Smart Government”, dengan menggandeng stake holder

pentahelix (multipihak) dimana unsur Pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu). Kepulauan Seribu perlu dikomunikasikan dengan berbagai kementerian teknis dan Kemenko Marves yang menangani KEK, dan yang menangani program prioritas wisata, karena Kep. Seribu sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata, sehingga tidak ketinggalan dengan Bangka Belitung. Para pejabat tinggi harus diundang untuk meninjau Kepulauan Seribu dalam rangka mempercepat turunnya kebijakan strategis untuk lebih meningkatkan pembangunan di Kepulauan Seribu. Perlunya kerjasama Pentahelix yang melibatkan Media Sosial sebagai Pentahelix kelima.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**SEMINAR
ONLINE**



PENINGKATAN PELAYANAN DI KEPULAUAN SERIBU

Kamis, 23 Desember 2021
Jam 13.00 – 17.00 WIB

Sambutan:

Prof. Ir. Kemas Ridwan Kurniawan, M.Sc., Ph.D
(Ketua DRD DKI Jakarta)

Junaedi, S. Sos. M. Si.
(Bupati Kepulauan Seribu)

Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
(Anggota DRD DKI Jakarta)

Dr. AH Rahadian
(Dosen Pascasarjana
Institut Stiami Jakarta)

Moderator:

Drs Teguh Imam Persana, M.Si

Wrap Up & Penutup :

Dr. Drs. Isroil Samihardjo, M.Def.Stud.
Ketua Komisi 1 DRD DKI Jakarta



**SEMINAR
ONLINE**



PENINGKATAN PELAYANAN DI KEPULAUAN SERIBU

Sambutan:

Prof. Ir. Kemas Ridwan Kurniawan, M.Sc., Ph.D
(Ketua DRD DKI Jakarta)

Dr. M. Si.
(Ketua DRD DKI Jakarta)

Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
(Anggota DRD DKI Jakarta)

Dr. AH Rahadian
(Dosen Pascasarjana
Institut Stiami Jakarta)

Moderator:
Imam Persana, M.Si

Wrap Up & Penutup :
Dr. Drs. Isroil Samihardjo, M.Def.Stud.
Ketua Komisi 1 DRD DKI Jakarta



PENINGKATAN PELAYANAN DI KEPULAUAN SERIBU

Sambutan:
Emas Ridwan Kurniawan, M.Sc., Ph.D
(Ketua DRD DKI Jakarta)

Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
(Anggota DRD DKI Jakarta)

Dr. AH Rahadian
(Dosen Pascasarjana
Institut Stiami Jakarta)

Wrap Up & Penutup :
Arnold Samihardjo, M.Def.Stud.
(Anggota DRD DKI Jakarta)

Talking: DRD_widodo pranowo





Teguh IP



DRD Komisi 1_Eman S N...



DRD Komisi-1 - Dr. Is...



Ubaidillah



Heru Susetyo FH-UI



DRD_Aisa Tobing



Dadang Solihin's network bandwidth is low

Recording



Dadang Solihin





Recording

View



Talking: Rahadian, AH

SEMINAR ONLINE



PENINGKATAN PELAYANAN DI KEPULAUAN SERIBU

Sambutan:
Dr. Kemas Ridwan Kurniawan, M.Sc., Ph.D
(Ketua DRD DKI Jakarta)

Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
(Anggota DRD DKI Jakarta)

Dr. AH Rahadian
(Dosen Pascasarjana
Institut Stiami Jakarta)

Wrap Up & Penutup:
Dr. Drs. Isroil Samihardjo, M.Def.Stud.
Ketua Komisi 1 DRD DKI Jakarta

Rahadian, AH



Leave

Find a participant

- Heru Susetyo FH-UI
- KhoirunurROFIK
- Nurfitri
- Oliv
- PK P1000 Kominfortik
- p1000_sdkpkp_devi

Invite Unmute Me

Chat

FGD mohon diisi
Daftar Hadir link
berikut ini
<https://forms.gle/wDayTF7VBgPrMaL77>

<https://twitter.com/DkiDrd/status/1473907278881255427?s=20>

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...



2021-12-23 Paparan Bupati (Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu).pdf * - Foxit Reader

ROH PENGEMBANGAN KEPULAUAN SERIBU

ROH PENGEMBANGAN P.1000

KAWASAN PARIWISATA

- UU 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI
- UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- PP 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
- Perpres 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

KAWASAN KONSERVASI

- PP 28 Tahun 2011 jo PP No. 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Sinergi Pengelolaan Sumber Daya Terpadu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha & Stakeholders terkait

Aspek yang perlu diperhatikan :

- Aspek pengelolaan (pembangunan masyarakat dan ekonomi)
- Aspek konservasi (perlindungan dari kerusakan)
- Aspek *biodiversity* (menjamin keanekaragaman biologis ekosistem wilayah pesisir).

Perlu mempertimbangkan :

- Perluasan Zonasi Pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Kep Seribu
- Kemudahan Perizinan Usaha
- Standarisasi material pembangunan yang dipersyaratkan.
- Daya Tarik Investor
- Potensi pendapatan Pusat/Daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja

KOMITMEN MENJAGA KESEIMBANGAN

- Menjamin kelestarian, keanekaragaman biologis dan produktivitas ekosistem wilayah pesisir.
- Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di Daerah untuk mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

PENINGKATAN PELAYANAN DI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - PROVINSI DKI JAKARTA | 3



Participants (37)

Find a participant

- Heru Susetyo FH-UI
- KhoirunurROFIK
- Nurfitri
- Oliv
- PK P1000 Kominfotik
- p1000_sdkpkp_devi

Invite Unmute Me

Chat

FGD mohon diisi Daftar Hadir link berikut ini
<https://forms.gle/wDayTF7VBgPrMaL77>

<https://twitter.com/DkiDrd/status/1473907278881255427?s=20>

2021-12-23 Paparan Bupati (Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu).pdf * - Foxit Reader

2021-12-23 Paparan Bu... x Capaian, Isu, Fakta da...

TANTANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TERPADU MASYARAKAT PESISIR DI KEPULAUAN SERIBU

TANTANGAN SOSIAL DAN EKONOMI

KEWENANGAN PROVINSI

UU 23 Tahun 2014

BAB V Bagian Kesatu Pasal 27 :

- Daerah Provinsi diberi **kewenangan utk mengelola sumber daya alam di laut yg ada diwilayahnya**
- Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola SDA di laut tersebut meliputi :
 - Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi.
 - Pengaturan administratif
 - Pengaturan tata ruang
 - Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut
 - Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara
- Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola SDA di laut tersebut diatur paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.

UU 29 Tahun 2007

Pasal 26 : Kewenangan Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang :

a. Tata ruang, SDA dan LH	d. Industri dan perdagangan
b. Pengendalian penduduk dan permukiman	e. Parwisata
c. Transportasi	

KEKUATAN

Rencana Induk KSPN
(PP 50 Tahun 2011 & Perpres 58 Tahun 2017)

HAMBATAN

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
(PP 28 Tahun 2011 jo PP No. 108 Tahun 2015)

Pemanfaatan di dalam tanah nasional diperbolehkan setelah memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan setiap pemegang izin pemanfaatan wajib membayar iuran pungutan tanpa pengecualian untuk pemerintah dan masyarakat.

APABILA PEMANFAATAN ZONA KAWASAN TNKS SANGAT TERBATAS

- Menurunkan minat Calon Pengembang/Investor.
- Menghambat tujuan percepatan pengembangan P.1000.
- Menurunkan nilai jual pariwisata dan daya tarik wisatawan (keterbatasan infrastruktur pariwisata)
- Menghambat pertumbuhan ekonomi & kesra.

APABILA PEMANFAATAN ZONA KAWASAN TNKS DIPERLUAS

- Meningkatkan minat Calon Pengembang/Investor.
- Wilyah cepat berkembang.
- Menambah nilai jual pariwisata dan daya tarik wisatawan.
- Meningkatkan pendapatan, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi & kesejahteraan masy.

PERLU PEMANFAATAN ZONA KAWASAN KONSERVASI TNKS (LAUT DANGKAL) DALAM PERCEPATAN PENGEMBANGAN P.1000

EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI DARATAN PULAU SANGAT TERBATAS

KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - PROVINSI DKI JAKARTA

7



Participants (37)

Find a participant

- Heru Susetyo FH-UI 🔇 🗑️
- KhoirunurROFIK 🔇 🗑️
- Nurfitri 🔇 🗑️
- Oliv 🔇 🗑️
- PK P1000 Kominfotik 🔇 🗑️
- p1000_sdkpkp_devi 🔇 🗑️

Invite Unmute Me

Chat

boleh dibagikan 🗑️

eman sulaeman Nasim to Everyone

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

Unmute Stop Video Participants 37 Chat Share Screen Record Reactions Apps Leave

2021-12-23 Paparan Bupati (Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu).pdf * - Foxit Reader

2 PENGOLAHAN SAMPAH

Jakarta
a city of collaboration

Statistik	Nilai	Unit
Jumlah Timbulan Sampah	39,34	ton/hari
Jumlah Sampah yg Tertangani	27,12	ton/hari
Jumlah Pengurangan Sampah di Pulau	8,57	ton/hari
Jumlah Sampah Yg belum tertangani th 2020	3,65	ton/hari

DAYA DUKUNG

- 16 L-Box (9 operasional)
- 24 Kapal sampah (8 cargo, 14 sisir sampah, 2 rusak)
- 24 germor (20 operasional)
- 24 Bank Sampah (1 RW 1 Bank Sampah)

KEBUTUHAN/PERMASALAHAN :

- Belum tersedianya TPS 3R setiap pulau
- Belum memadainya Dermaga Transit sebagai pengelolaan sampah dengan konsep *Waste to Energy* dan Pusat Eduwisata Pengelolaan Sampah
- Pengelolaan sampah masih dilakukan secara manual

RENCANA KERJA :

- Pembangunan TPS 3R di setiap pulau
- Pembangunan Dermaga Sampah
- Pengembangan 2 Dermaga Transit sebagai pengelolaan sampah dengan konsep *Waste to Energy* terkoneksi jaringan PLN dan Pusat Eduwisata Pengelolaan Sampah
- Mekanisasi pengelolaan sampah seperti penggunaan alat berat
- Pengadaan kapal *Conveyor* penangkap sampah dan penanganan oil spil di perairan Kepulauan Seribu

PENINGKATAN PELAYANAN DI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU – PROVINSI DKI JAKARTA 11



Participants (37)

Find a participant

- KhoirunurROFIK
- Nurfitri
- Oliv
- PK P1000 Kominfortik
- p1000_sdkpkp_devi.
- PS Prayoga Sepgraena

Invite Unmute Me

Chat

@heru....masih perawatan dg akufuntur selain dg dokter

waalaikum salam wr wb..Prof Heru...terima kasih atas perhatiannya

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

2021-12-23 Paparan Bupati (Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu).pdf * - Foxit Reader

2021-12-23 Paparan Bu... x Capaian, Isu, Fakta da...

5 ENERGI & LISTRIK

PULAU SERIBU TELAH TERLAYANI LISTRIK 24 JAM :

- Pulau pemukiman tersambung dengan jaringan PLN (khusus Pulau Sebira dengan PLTS & PLTD)
- Pulau Resort dengan menyediakan genzet/diesel dan PLTS secara mandiri

SISTEM KETENAGALISTRIKAN

- Pulau Pemukiman dg Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) 20 kV, Kapasitas 10 MW
- Pulau Sebira menyala 24 jam :
 - PLTD Kapasitas 0,3 MW
 - PLTS, Kapasitas 400 Kwp

PELANGGAN LISTRIK
Jumlah 7.818 Pelanggan
(7.666 melalui SKLTM, 152 melalui listrik PLTS/PLTD Pulau Sebira)

PEMBAYARAN LISTRIK

- Pelanggan listrik melalui SKLTM, melalui sistem kWh meter PraBayar ke PLN
- Pembayaran listrik di P. Sabira sesuai tarif yg berlaku di PT. PLN dikali jumlah daya (kWh) yg dipakai namun yg menarik retribusinya adalah Pemprov DKI Jakarta dan disetor ke Kasda

RASIO ELEKTRIFIKASI
Rasio Elektrifikasi / Pemenuhan Kebutuhan di Kepulauan Seribu sudah 100%. Waktu menyala di Pulau Pemukiman sudah 24 jam termasuk di **Pulau Sebira**.

SPBU APUNG
Penyediaan **Kapal SPBU Apung** di Kepulauan Seribu telah beroperasi sejak **Juli 2021**

KEBUTUHAN/PERMASALAHAN

- Energi Listrik dari Sumber PLTS masih terbatas selama 12 jam dan 12 jam selanjutnya dari Genset/PLTD.
- Belum tersedianya lahan untuk Peningkatan daya PLTS untuk panel surya
- Belum terselesaikannya Pembangunan Penguatan Kabel Listrik Bawah Laut. Saat ini sudah terbangun kabel laut (backup/Double Track) dari Gardu Teluknaga Sampai Gardu Pulau Untung Jawa (30 Km), Tinggal Dilanjutkan Ke Pulau-pulau Lainnya

USULAN RENCANA KERJA

- Lanjutan Pembangunan Penguatan Kabel Listrik Bawah Laut oleh PT PLN Disjaya (backup/double track) ke pulau-pulau lainnya.
- Peningkatan Energi Listrik dari Sumber PLTS menjadi 24 jam.

PENINGKATAN PELAYANAN DI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA

KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - PROVINSI DKI JAKARTA

14



Kabupaten Adm. Kep. Seribu

Participants (37)

Find a participant

- KhoirunurROFIK
- Nurfitri
- Oliv
- P1000 Kominfortik
- p1000_sdkpkp_devi.
- Prayoga Sepgraena

Invite

Unmute Me

Chat

ini...tadi saya ada janji sama Prof Ibnu...menghadiri.rapat DRD DKI Jakarta dg Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta di Dinas Perumahan DKI Jakarta

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

2021-12-23 Paparan Bupati (Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu).pdf * - Foxit Reader

File Home Comment View Form Protect Share Connect Help Extras Tell me what you want to do

Start 2021-12-23 Paparan Bu... x Capaian, Isu, Fakta da... eSign PDF Docs

6 PERTANIAN & PERIKANAN



Status Nelayan	2019	Jenis Kapal Motor	2019
1. Pemilik	821	- 0 s.d 5 GT	725
2. Pekerja	1.203	- 5 s.d 10 GT	93
		- 10 s.d 20 GT	3
Jumlah Nelayan	2.024	Jumlah Kapal	821

NO	WILAYAH	LUAS AREAL	
		EXISTING (2019)	POTENSI (Ha)
1	P. PANGGANG	20 - 30 Ha	35 - 50
2	KARANG LEBAR	40 - 50 Ha	150
3	PULAU TIDUNG	25 - 40 Ha	50 - 80
4	PULAU PARI	15 - 30 Ha	50 - 60

No	Hasil Produksi Tangkap	Jumlah	
		Volume (Ton)	Nilai (Rp)
1	Tahun 2018	62.325,70	5.293.045
2	Tahun 2019	62.325,70	5.526.631

KEBUTUHAN/ PERMASALAHAN

- Kesiapan SDM kepariwisataan untuk menyambut kedatangan para wisatawan
- Belum adanya lokasi binaan/lokasi sementara atau outlet untuk memasarkan produk
- Perlu peningkatan keterampilan dalam mengolah dan melakukan diversifikasi produk olahan hasil laut

RENCANA KERJA

- Mendorong kreatifitas masyarakat dalam menciptakan jenis usaha baru dan penguatan kapasitas SDM pelaku wisata :
 - Pembentukan kelompok usaha wisata
 - Pelatihan & sertifikasi Bahasa Asing
- Mendorong UMKM dlm peningkatan mutu dan keberagaman produk unggulan bagi pengrajin produk bercorak khas Kepulauan Seribu dengan:
 - Pelatihan produksi
 - Fasilitasi /pendampingan untuk permodalan dan teknis pemasaran
 - Penyediaan outlet/ kios yang memadai
- Diversifikasi mata pencaharian (Mendorong nelayan agar beralih dari konsep nelayan tangkap menjadi nelayan budidaya), melalui:
 - Penyediaan Keramba Ikan.
 - Pelatihan teknis perikanan (Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah hasil perikanan)
 - Fasilitasi / pendampingan untuk teknis pemasaran
 - Pendampingan dlm permodalan atau pinjam bunga ringan dari Kementerian KKP berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Nelayan.

PENINGKATAN PELAYANAN DI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA

KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU – PROVINSI DKI JAKARTA

15

15 / 20 122.36%



Participants (37)

Find a participant

-  KhoirunurROFIK  
-  Nurfitri  
-  Oliv  
-  PK P1000 Kominfotik  
-  p1000_sdkpkp_devi.  
-  PS Prayoga Sepgraena  

Invite

Unmute Me

Chat

ini...tadi saya ada janji sama Prof Ibnu...menghadiri.rapat DRD DKI Jakarta dg Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta di Dinas Perumahan DKI Jakarta

Who can see your messages? Recording On

To: Everyone

Type message here...

2021-12-23 Paparan Bupati (Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu).pdf * - Foxit Reader

DASAR PERTIMBANGAN URGENSI PENAMBAHAN WILAYAH KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU DARI BERBAGAI ASPEK

1 ASPEK HUKUM

- UU No. 23 Th. 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- KEPGUB DKI Jakarta No. 3 Th. 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan di Propinsi DKI Jakarta.
- PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- PERPRES No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur.
- Revisi PERDA DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 melalui Dinas Cipta Karta, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam pembahasannya belum mengatur pengawasan, pengendalian dan penetapan pulau reklamasi C, D, G, dan N.

2 ASPEK EKONOMI

- Keterbatasan lahan daratan dan tidak ada pusat perekonomian serta bisnis berdampak terhadap lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas.
- Kecenderungan masyarakat yang mengandalkan Potensi SDA mengakibatkan kemiskinan terus meningkat (termiskin di Jakarta sesuai data BPS).
- Keterbatasan luasan wilayah daratan dan benturan peraturan mengakibatkan Nilai investasi dan Kontribusi PAD relatif sangat rendah.
- Tidak adanya wilayah penunjang perekonomian berdampak disparitas dalam pembangunan ekonomi di Kepulauan Seribu dg 5 wilayah kota.
- Pengembangan UMKM di wilayah Kepulauan Seribu yang cakupan konsumennya dalam skala kecil dan berbeda dengan 5 wilayah kota.
- Secara geografis kepulauan seribu terdiri dari pulau-pulau kecil yg mengandalkan transportasi laut serta keterbatasan operasional transportasi, menyebabkan masyarakat sulit berkembang.

3 ASPEK SOSIAL

- Terjadinya kesenjangan sosial di wilayah Administratif Kepulauan Seribu jika dibandingkan dengan wilayah darat DKI Jakarta.
- belum terkendalinya pertumbuhan penduduk dan Persebaran penduduk yang tidak merata setiap pulau di wilayah Kepulauan Seribu dikarenakan keterbatasan lahan daratan.

Tahun	Kepulauan Seribu	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Utara	DKI Jakarta
2017	12,098	3,14	2,83	2,73	3,43	3,31	3,14
2018	11,908	2,83	2,73	3,12	4,16	3,78	3,59
2019	12,029	2,73	3,12	4,51	3,45	3,39	3,25
2020	14,817	3,43	4,16	4,51	4,25	4,78	4,53

Sumber: Susenas Maret 2020

PENINGKATAN PELAYANAN DI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - PROVINSI DKI JAKARTA 17



2021-12-23 Paparan Bupati (Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu).pdf* - Foxit Reader

File Home Comment View Form Protect Share Connect Help Extras Tell me what you want to

Start 2021-12-23 Paparan Bu... x Capaian, Isu, Fakta da...

DASAR PERTIMBANGAN URGENSI PENAMBAHAN WILAYAH KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU DARI BERBAGAI ASPEK

4 ASPEK BUDAYA

- Mainset dan perilaku mayoritas besar masyarakat Kepulauan Seribu yang memiliki kecenderungan mengharapkan bantuan.
- Masyarakat Kepulauan Seribu yang terisolir dalam suatu wilayah pulau cenderung kurang menerima terhadap budaya luar.

Adanya beberapa ras, suku maupun etnis dalam masyarakat Kepulauan Seribu yang menentukan suatu wilayah, berdasarkan hal tersebut maka masyarakat cenderung sulit menerima budaya luar hal ini di dukung oleh masyarakat yang menetap di wilauah pulau secara terus menerus (terisolir)

5 ASPEK PEMERINTAHAN DAN HANKAM

- Belum adanya unsur pimpinan daerah atau kantor pelayanan FORKOMINDA di Kepulauan Seribu mengingat tidak adanya lahan yang tersedia di wilayah Kepulauan Seribu.
- Pelayanan dalam sektor Pemerintahan yang kurang maksimal akibat terbatasnya mobilitas penduduk.
- Terhambatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akibat terbatasnya jaringan telekomunikasi.

Perlu adanya kantor pelayanan lintas sektor di wilayah Kepulauan Seribu yang saat ini pelayanan cenderung dapat dilakukan di wilayah Jakarta Utara

6 ASPEK POLITIK

- Terhambatnya penyaluran penyampaian aspirasi masyarakat kepulauan seribu karena tidak ada Dapil khusus Kepulauan Seribu

Dibutuhkan keterwakilan khusus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari kepulauan seribu yang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasai masyarakat kepulauan seribu sehingga diperlukan dapil khusus Kepulauan Seribu dengan pertimbangan penambahan jumlah penduduk dan wilayah untuk menempati 1 kursi DPRD

PENINGKATAN PELAYANAN DI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DKI JAKARTA

KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU – PROVINSI DKI JAKARTA

18



Participants (37)

Find a participant

- Heru Susetyo FH-UI
- KhoirunurROFIK
- Nurfitri
- Oliv
- PK P1000 Kominfotik
- p1000_sdkpkp_devi.
- PS Prayoga Sepgraena
- PP priyadi priyautama
- Refi_Bag.Umprot P1000
- Resista Vikaliana
- R Rohman
- RD Ryan Dwi Saputra
- S- Sabrina - Dinkes Yankes
- SP SDKPKP P.1000_Elis Rora
- Sekretariat DRD
- SD Sekretariat DRD

Leave

Invite

Unmute Me

Digital Islands



- Pada 7 Februari 2018 Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merencanakan program Digital Island. Program ini bertujuan untuk memberikan akses layanan digital di Kepulauan Seribu.
- Pada 31 Oktober 2019 Kepulauan Seribu telah dicanangkan sebagai Digital Islands oleh Bank Indonesia
- Tujuannya untuk meningkatkan berbagai akses produk dan layanan yang berbasis perbankan digital di Kepulauan Seribu.

dadang-solihin.blogspot.com

2



Participants (40)

Find a participant

	Hartanto Indradi		
	Heru Susetyo FH-UI		
	Kabupaten Adm. Kep. Seribu		
	KhoirunurROFIK		
	Nurfitri		
	Oliv		
	P1000 Kominfortik		
	p1000_sdkpkp_devi.		
	Prayoga Sepgraena		
	priyadi priyautama		
	Refi_Bag.Umprot P1000		
	Resista Vikaliana		
	Rohman		
	Ryan Dwi Saputra		
	Sabrina - Dinkes Yankes		
	SDKPKP P.1000_Elis Rora		

Invite

Unmute Me



Unmute



Stop Video



Participants 40



Chat



Share Screen



Record



Reactions



Apps

Leave



Type here to search



14:18
23/12/2021

Apa itu Smart Government?

- **Smart Government:** Istilah yang merujuk pada pengimplementasian ICT pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif.
- **Penyebabnya:**
 - V.U.C.A (Volatile, Uncertain, Complex, Ambigue)
 - B.A.N.I (Brittle, Anxiety, Non-Linear, Incomprehensible)
- **Caranya:** Dynamic Governance (Prof. Boon Siong Neo).
- **Prinsipnya:** Good Governance, yaitu interaksi antar stakeholders bersendikan nilai-nilai yang good.
- **Strateginya:** Innovation → One Stop Service, dll
- **Alatnya:** Digital Government.
- **Stakeholdersnya:** Pentahelix.

dadang-solihin.blogspot.com

3



Participants (38)

Find a participant

- | | | | |
|--|----------------------------|--|--|
| | Hartanto Indradi | | |
| | Heru Susetyo FH-UI | | |
| | Kabupaten Adm. Kep. Seribu | | |
| | KhoirunurROFIK | | |
| | Nurfitri | | |
| | P1000 Kominfortik | | |
| | p1000_sdkpkp_devi. | | |
| | Prayoga Sepgraena | | |
| | priyadi priyautama | | |
| | Resista Vikaliana | | |
| | Rohman | | |
| | Ryan Dwi Saputra | | |
| | Sabrina - Dinkes Yankes | | |
| | SDKPKP P.1000_Elis Rora | | |
| | Sekretariat DRD | | |
| | Sekretariat DRD | | |

Leave

Invite

Unmute Me

Unmute Stop Video

Participants 38

Chat

Share Screen

Record

Reactions

Apps



**SEMINAR
ONLINE**



PENINGKATAN PELAYANAN DI KEPULAUAN SERIBU

Kamis, 23 Desember 2021

Jam 13.00 – 17.00 WIB

Meeting ID: 826 8745 8387

Passcode: DRDKOM1



Sambutan:

Prof. Ir. Kemas Ridwan Kurniawan, M.Sc., Ph.D
(Ketua DRD DKI Jakarta)



Junaedi, S. Sos. M. Si.
(Bupati Kepulauan Seribu)



Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
(Anggota DRD DKI Jakarta)



Dr. AH Rahadian
(Dosen Pascasarjana
Institut Stiami Jakarta)

NARAHUBUNG

Dr. Ing. Widodo

Setiyo Pranowo (082111637144)

Resista Vikaliana (081296244431)



Moderator:

Drs Teguh Imam Persana, M.Si



Wrap Up & Penutup :

Dr. Drs. Isroil Samihardjo, M.Def.Stud.
Ketua Komisi 1 DRD DKI Jakarta



**PEMERINTAH KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DKI JAKARTA**



**PENINGKATAN PELAYANAN
DI KEPULAUAN SERIBU DKI JAKARTA
MELALUI PENGELOLAAN SUMBERDAYA TERPADU
MASYARAKAT PESISIR**

**DISAMPAIKAN OLEH
BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
(JUNAEDI, S.Sos., M.Si)**

KAMIS, 23 DESEMBER 2021



GAMBARAN UMUM



1

113 Pulau

- Luas Total : 7.006,48 km²
- Luas Daratan : 8,98 km²
- Luas Laut : 6.997,5 km²
(10 x Luas Daratan Kota DKI 661,5 km²)



2

6 Kelurahan

- Kel. P. Untung Jawa
- Kel. P. Tidung
- Kel. P. Pari
- Kel. P. Panggang
- Kel. P. Kelapa
- Kel. P. Harapan



3

2 Kecamatan

- Kec. Kep. Seribu Utara
- Kec. Kep. Seribu Selatan



4

Penduduk

- 29.008 Jiwa
- 8.320 KK
- 24 RW 127 RT
- 12 FPK 24 LMK
- 72 FKDM



5

Taman Nasional

Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu
Seluas 107.489 Ha

(PP No. 28 Tahun 2011
jo PP No. 108 Tahun 2015)



6

6 Zona Pulau RDTR

- 11 Sub Zonasi Perumahan
- 38 Sub Zonasi Hijau
- 8 Sub Zonasi Konservasi
- 1 Sub Zonasi Pertambangan
- 1 Sub Zonasi Terminal
- 47 Sub Zonasi Perdagangan



7

Zona DPL-BM

(Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat, 6 Zona Inti, 6 Zona Penyangga dan 6 Zona Pemanfaatan + Zona Inti Pulau Tidung Kecil)

1. DPL-BM Pulau Pari
2. DPL-BM Pulau Payung
3. DPL-BM Pulau Tidung
4. DPL-BM Pulau Gosong Pramuka
5. DPL-BM Pulau Kelapa
6. DPL-BM Pulau Harapan

ROH PENGEMBANGAN KEPULAUAN SERIBU



TUJUAN DAN UPAYA PENGELOLAAN SUMBERDAYA TERPADU MASYARAKAT PESISIR



TUJUAN

- Tujuan Pengelolaan Sumberdaya Terpadu Masyarakat Pesisir di Kepulauan Seribu DKI Jakarta adalah mengembangkan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang baik/efektif, melalui pengembangan dan penggunaan metode, strategi, kegiatan perencanaan dan aturan-aturan lokal yang dapat memperbaiki atau mempertahankan kualitas hidup masyarakat pesisir, serta meningkatkan atau mempertahankan kondisi sumberdaya pesisir dimana banyak orang menggantungkan kehidupannya.

UPAYA

- 1) Peningkatan partisipasi pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pesisir;
- 2) Memperbaiki pelaksanaan dan pengembangan kebijakan lokal, dan;
- 3) Memperkuat kapasitas lokal.



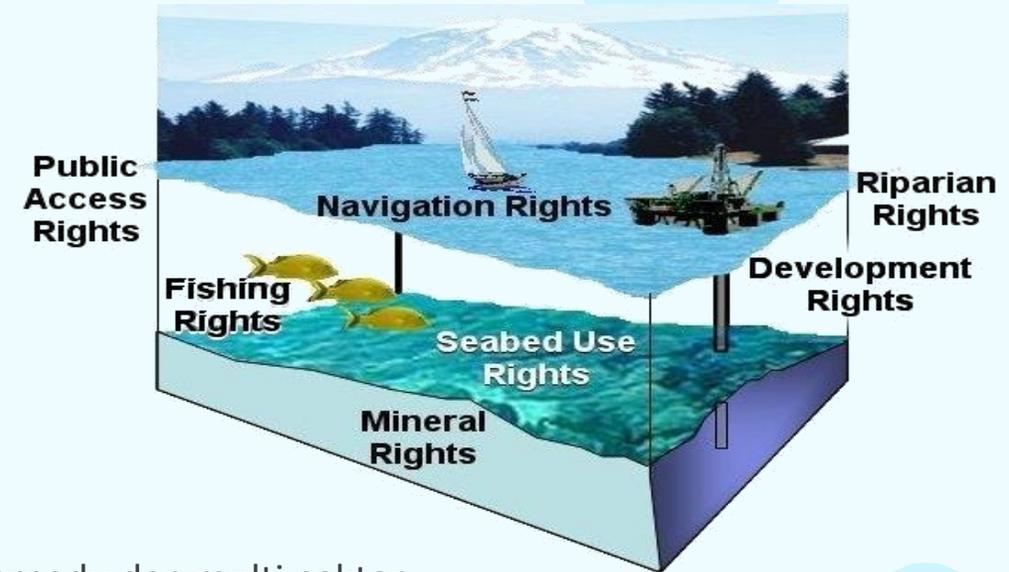
DIMENSI DAN PRINSIP PENGELOLAAN SUMBERDAYA TERPADU MASYARAKAT PESISIR

DIMENSI

1. Terpadu antar sektor;
2. Terpadu antar ekosistem (ruang) darat dan air di wilayah pesisir;
3. Terpadu antar tingkatan pemerintahan;
4. Terpadu antar disiplin ilmu-pengelolaan;
5. Terpadu antar bangsa dan politik.

PRINSIP

- a. Program yang dilaksanakan memerlukan pendekatan menyeluruh (*holistic*), terpadu dan multi-sektor;
- b. Perencanaan harus konsisten, dipadukan dengan rencana Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berkelanjutan;
- c. Dikembangkan dan diintegrasikan ke dalam program di lembaga yang sudah ada;
- d. Proses perencanaan dan pelaksanaan harus melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kelompok dan komunitas sebagai partner yang seimbang (*equal*) dalam pengambilan keputusan melalui lingkup pengelolaan bersama (*co-management*);
- e. Program dibangun dan didasarkan pada kapasitas lokal masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pengelolaan secara berkelanjutan, serta membuka peluang membangun melalui mekanisme pendanaan secara swadaya maupun CSR;
- f. Program harus menjawab isu-isu kualitas hidup / kesejahteraan masyarakat lokal dan isu konservasi (perlindungan sumberdaya).

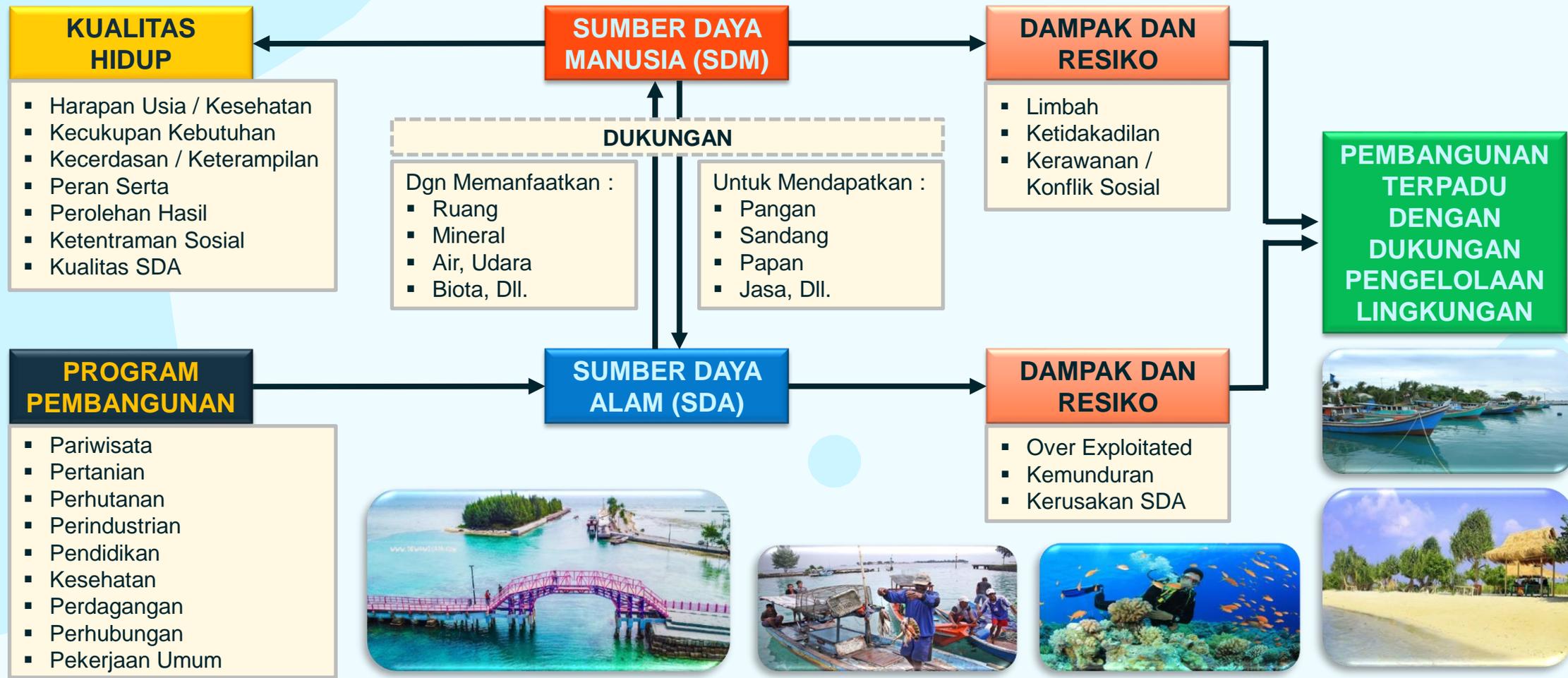




TANTANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TERPADU MASYARAKAT PESISIR DI KEPULAUAN SERIBU

1

TANTANGAN SDM DAN SDA





TANTANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TERPADU MASYARAKAT PESISIR DI KEPULAUAN SERIBU



TANTANGAN SOSIAL DAN EKONOMI

KEWENANGAN PROVINSI

UU 23 Tahun 2014

BAB V Bagian Kesatu Pasal 27 :

- Daerah Provinsi diberi kewenangan utk mengelola sumber daya alam di laut yg ada diwilayahnya
- Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola SDA di laut tersebut meliputi :
 - a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi.
 - b. Pengaturan administratif
 - c. Pengaturan tata ruang
 - d. Ikut serta dalam memelihara keamanan di laut
 - e. Ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara
- Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola SDA di laut tersebut diatur paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.

UU 29 Tahun 2007

- **Pasal 26** : Kewenangan Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang :

a. Tata ruang, SDA dan LH	d. Industri dan perdagangan
b. Pengendalian penduduk dan permukiman	e. Pariwisata
c. Transportasi	

EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI **DARATAN PULAU SANGAT TERBATAS**

PERLU PEMANFAATAN ZONA KAWASAN KONSERVASI TNKS (LAUT DANGKAL) DALAM PERCEPATAN PENGEMBANGAN P.1000

KEKUATAN

Rencana Induk KSPN (PP 50 Tahun 2011 & Perpres 58 Tahun 2017)

HAMBATAN

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) (PP 28 Tahun 2011 jo PP No. 108 Tahun 2015)

Pemanfaatan di dalam tanah nasional diperbolehkan setelah memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan setiap pemegang izin pemanfaatan wajib membayar iuran pungutan tanpa pengecualian untuk pemerintah dan masyarakat.

APABILA PEMANFAATAN ZONA KAWASAN TNKS SANGAT TERBATAS

- Menurunkan minat Calon Pengembang/Investor.
- Menghambat tujuan percepatan pengembangan P.1000.
- Menurunkan nilai jual pariwisata dan daya tarik wisatawan (keterbatasan infrastruktur pariwisata)
- Menghambat pertumbuhan ekonomi & kesra.

APABILA PEMANFAATAN ZONA KAWASAN TNKS DIPERLUAS

- Meningkatkan minat Calon Pengembang/Investor.
- Wilayah cepat berkembang.
- Menambah nilai jual pariwisata dan daya tarik wisatawan.
- Meningkatkan pendapatan, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi & kesejahteraan masy.

PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN TERPADU (PWPLT)



Koordinasi dalam Tim PWPLT Pusat

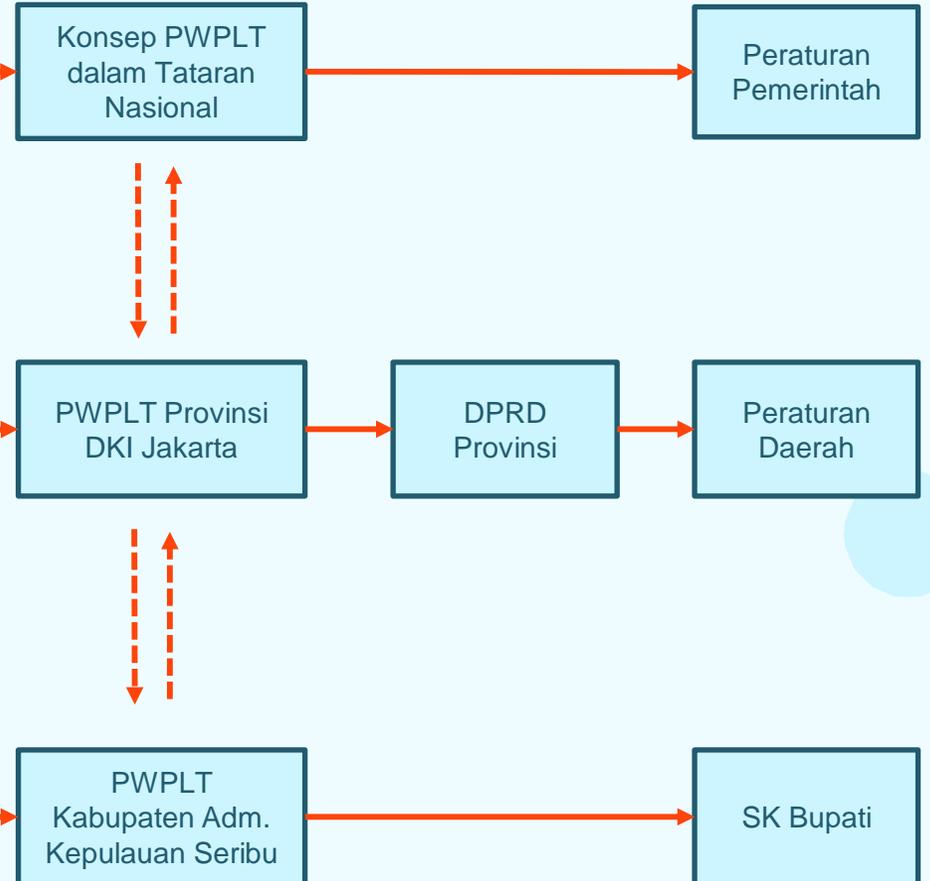
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian LHK
- Kementerian PUPR
- Kementerian Perhubungan
- Instansi / Stakeholders Terkait Lainnya

Koordinasi dalam Tim PWPLT Provinsi

- Bappeda Provinsi
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Ket. Pangan, Kelautan & Perikanan
- Dinas Sumber Daya Air
- Pengelola Taman Laut
- Dinas Perhubungan
- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Instansi / Stakeholders Terkait Lainnya

Koordinasi dalam Tim PWPLT Kab/Kota Adm.

- Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kab.
- Suku Dinas Lingkungan Hidup
- Suku Dinas Ket. Pangan, Kelautan & Perikanan
- Suku Dinas Sumber Daya Air
- Pengelola Taman Laut
- Suku Dinas Perhubungan
- Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Instansi / Stakeholders Terkait Lainnya





KONDISI EKSISTING DAN RENCANA KERJA

1 KEPARIWISATAAN



JUMLAH KUNJUNGAN

- Tahun 2020 : 237.421 (2019, 662.000)
- WISMAN : 233.681
 - WISNUS : 237.421



AMENITAS

- 7 Hotel Resort
- 441 Homestay
- 3 Restoran
- Jaringan Listrik, Internet
- Air Bersih



AKSESIBILITAS & FASILITAS

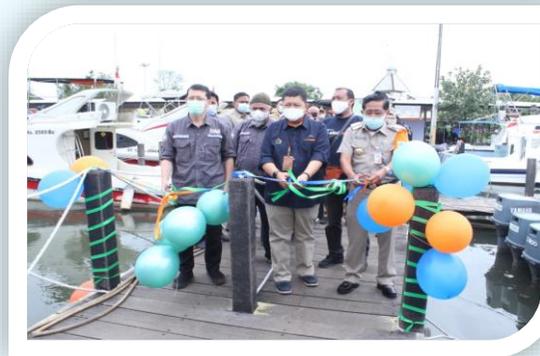
- Jalan dan Transportasi
- Cagar Budaya
- Sarana Snorkling, Diving, Swimming, Fishing, Camping Ground, Outbond, Education/ Riset, Religi/Sejarah
- Benteng Martelo, Jembatan Cinta, Pantai Pasir Perawan, Taman Nasional, Pantai Sakura, Jembatan Pengantin, dst.

KEBUTUHAN/PERMASALAHAN

- Aksesibilitas (kapal wisata antar pulau/hopping islands)
- Atraksi (perlu penambahan destinasi Pulau Kelapa dan Harapan)
- Amenitas (penambahan sarana perbankan lebih dari 1 bank)

RENCANA KERJA

- Festival Pulau Seribu (lomba layang, perahu layar, permainan rakyat, lomba renang antar pulau)
- Kolaborasi dg pelaku usaha (missal pertamina) membangun Pantai Sakura di P. Untung Jawa
- Hajatan tradisi budaya Kepulauan Seribu (pulang babang, kemong, penganten laut, sedekah laut, ulang tahun kabupaten)
- Pembangunan pantai public
- Pentas Seni Ruang Publik
- Branding (miniature perahu mini cole)
- Bimbingan Teknis (Digital marketing, pemandu wisata)
- Pelatihan Bahasa Inggris (Haul/maulud, ulang tahun Pulau UJ)
- Penetapan Pulau Tidung kecil untuk eco agro mina wisata pertanian & perikanan



2 PENGOLAHAN SAMPAH



39,34
ton/hari



Jumlah Timbulan
Sampah
Th. 2020

27,12
ton/hari



Jumlah Sampah
yg Tertangani
Th. 2020

8,57
ton/hari



Jumlah
Pengurangan
Sampah di Pulau
Th. 2020

3,65
ton/hari



Jumlah Sampah
Yg belum
tertangani th 2020

KEBUTUHAN/PERMASALAHAN :

- Belum tersedianya TPS 3R setiap pulau
- Belum memadainya Dermaga Transit sebagai pengelolaan sampah dengan konsep *Waste to Energy* dan Pusat Eduwisata Pengelolaan Sampah
- Pengelolaan sampah masih dilakukan secara manual

RENCANA KERJA :

- Pembangunan TPS 3R di setiap pulau
- Pembangunan Dermaga Sampah
- Pengembangan 2 Dermaga Transit sebagai pengelolaan sampah dengan konsep *Waste to Energy* terkoneksi jaringan PLN dan Pusat Eduwisata Pengelolaan Sampah
- Mekanisasi pengelolaan sampah seperti penggunaan alat berat
- Pengadaan kapal *Conveyor* penangkap sampah dan penanganan oil spil di perairan Kepulauan Seribu

DAYA DUKUNG



16 L-Box
(9 operasional)



24 Kapal sampah
(8 cargo, 14 sisir
sampah, 2 rusak)



24 germor
(20 operasional)



24 Bank Sampah
(1 RW 1 Bank Sampah)

3 PENGELOLAAN LIMBAH



No	Nama Fasilitas	Kapasitas Pengolahan	Jumlah SR	Lokasi
1	IPAL Zona 1	70 m3 / day	± 266	Pulau Untung Jawa
2	IPAL Zona 1	30 m3 / day	± 22	Pulau Pramuka
3	IPAL Zona 2	45 m3 / day	± 155	Pulau Pramuka
4	IPAL Zona 3	45 m3 / day	± 141	Pulau Pramuka
5	IPAL Zona 4	45 m3 / day	± 64	Pulau Pramuka
6	IPAL Zona 5	30 m3 / day	± 52	Pulau Pramuka
7	IPAL Zona Utara	200 m3 / day	± 104	Pulau Tidung
8	IPAL Zona Timur	150 m3 / day	± 150	Pulau Tidung
9	IPAL Zona Barat	200 m3 / day	± 352	Pulau Tidung
10	IPAL Zona Selatan	100 m3 / day	± 18	Pulau Tidung
11	IPAL Zona 1	90 m3 / day	± 105	Pulau Panggang
12	IPAL Zona 2	45 m3 / day	± 104	Pulau Panggang
13	IPAL Zona 3	90 m3 / day	± 123	Pulau Panggang
14	IPAL Zona 4	45 m3 / day	± 54	Pulau Panggang
15	IPAL Zona 1	150 m3/day	± 150	Pulau Lancang
16	IPAL Zona 2	200 m3/day	± 150	Pulau Lancang
17	IPAL Zona 1	300 m3/day	± 365	Pulau Harapan
18	IPAL Zona 1	100 m3/day	± 154	Pulau Sebir
19.	IPAL zona 1	70 m3/day	± 107	Pulau Kelapa dua

8.320
KK

1.822
KK
TERLAYANI

223,05
HA
PULAU PENDUDUK

Existing

8 Pulau tersedia Fasilitas IPAL

KEBUTUHAN/PERMASALAHAN

- Sumber limbah terbesar berasal dari rumah tangga
- Belum seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS) tersambungkan ke instalasi SPALD
- Pulau Payung, Pari dan Kelapa belum tersedia

RENCANA KERJA

- Pembangunan SPALD di Pulau Kelapa zona 3 & 4
- Fasilitasi sambungan baru Rumah Tangga Sasaran (RTS)

4 MITIGASI BENCANA & DAMPAK PERUBAHAN IKLIM



NO	NAMA PULAU	LUAS (Ha)	JUMLAH PENDUDUK	KELILING TUBIR (M)	PANJANG BREAKWATER (M)
1.	TIDUNG BESAR	50,13	5.570	8.339,65	1.849,55
2.	PAYUNG BESAR	20,86	185	BELUM ADA	
3.	PARI	41,32	1.295	BELUM ADA	
4.	LANCANG BESAR	15,13	2.122	2.416,20	1.744,38
5.	PRAMUKA	16,00	2.140	2.892,16	1.341,89
6.	PANGGANG	9,00	4.786	4.394,95	1.579,44
7.	UNTUNG JAWA	40,10	2.422	2.134,13	427,85
8.	KELAPA	13,09	6.654	3.640,84	759,90
9.	KELAPA DUA	1,90	489	4346,08	874,6
10.	HARAPAN	6,70	1.969	4.152,24	723,8
11.	SEBIRA	8,82	592	3.974,84	400

KEBUTUHAN/PERMASALAHAN

- Potensi terjadinya bencana puting beliung.
- Potensi kebakaran di pulau padat penduduk dan kapal nelayan.
- Terjadinya pasang air laut yang masuk ke area pemukiman dan adanya abrasi.
- Belum tersedianya sarana pencegahan dini bencana *Early Warning System (EWS)*, dan *water level*.

RENCANA KERJA

- Pembangunan Pos Pemadam dan penyediaan sarana kebakaran di daratan dan di lautan.
- Pembangunan tanggul dan breakwater pengaman pulau yang multifungsi dengan konsep *floating breakwater* ramah lingkungan.
- Penanaman mangrove di pesisir pantai.
- Kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat terhadap bencana
- Penyiapan *one man one life jacket*
- Penyusunan SOP evakuasi kebencanaan di Pulau



5 ENERGI & LISTRIK



PULAU SERIBU TELAH TERLAYANI LISTRIK 24 JAM :

- Pulau pemukiman tersambung dengan jaringan PLN (khusus Pulau Sebira dengan PLTS & PLTD)
- Pulau Resort dengan menyediakan genzet/diesel dan PLTS secara mandiri

SISTEM KETENAGALISTRIKAN



- Pulau Pemukiman dg Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) 20 kV, Kapasitas 10 MW
- Pulau Sebira menyala 24 jam :
 - a. PLTD Kapasitas 0,3 MW
 - b. PLTS, Kapasitas 400 Kwp



PELANGGAN LISTRIK

Jumlah 7. 818 Pelanggan
(7.666 melalui SKLTM, 152 melalui listrik PLTS/PLTD Pulau Sebira)

PEMBAYARAN LISTRIK

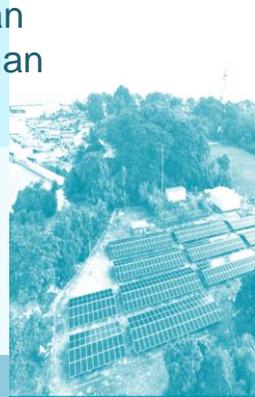
- Pelanggan listrik melalui SKLTM, melalui sistem kWh meter PraBayar ke PLN
- Pembayaran listrik di P. Sabira sesuai tarif yg berlaku di PT. PLN dikali jumlah daya (kWh) yg dipakai namun yg menarik retribusinya adalah Pemprov DKI Jakarta dan disetor ke Kasda

RASIO ELEKTRIFIKASI

Rasio Elektrifikasi / Pemenuhan Kebutuhan di Kepulauan Seribu sudah 100%. Waktu menyala di Pulau Pemukiman sudah 24 jam termasuk di **Pulau Sebira**.

SPBU APUNG

Penyediaan **Kapal SPBU Apung** di Kepulauan Seribu telah beroperasi sejak Juli 2021



KEBUTUHAN/PERMASALAHAN

- Energi Listrik dari Sumber PLTS masih terbatas selama 12 jam dan 12 jam selanjutnya dari Genset/PLTD.
- Belum tersedianya lahan untuk Peningkatan daya PLTS untuk panel surya
- Belum terselesaikannya Pembangunan Penguatan Kabel Listrik Bawah Laut. Saat ini sudah terbangun kabel laut (backup/Double Track) dari Gardu Teluknaga Sampai Gardu Pulau Untung Jawa (30 Km), Tinggal Dilanjutkan Ke Pulau-pulau Lainnya

USULAN RENCANA KERJA

- Lanjutan Pembangunan Penguatan Kabel Listrik Bawah Laut oleh PT PLN Disjaya (backup/double track) ke pulau-pulau lainnya.
- Peningkatan Energi Listrik dari Sumber PLTS menjadi 24 jam.

6 PERTANIAN & PERIKANAN



Status Nelayan	2019
1. Pemilik	821
2. Pekerja	1.203
Jumlah Nelayan	2.024

Jenis Kapal Motor	2019
- 0 s.d 5 GT	725
- 5 s.d 10 GT	93
- 10 s.d 20 GT	3
Jumlah Kapal	821

NO	WILAYAH	LUAS AREAL	
		EXISTING (2019)	POTENSI (Ha)
1	P. PANGGANG	20 - 30 Ha	35 - 50
2	KARANG LEBAR	40 - 50 Ha	150
3	PULAU TIDUNG	25 - 40 Ha	50 - 80
4	PULAU PARI	15 - 30 Ha	50 - 60

No	Hasil Produksi Tangkap	Jumlah	
		Volume (Ton)	Nilai (Rp)
1	Tahun 2018	62.325,70	5.293.045
2	Tahun 2019	62.325,70	5.526.631



KEBUTUHAN/ PERMASALAHAN

- Kesiapan SDM kepariwisataan untuk menyambut kedatangan para wisatawan
- Belum adanya lokasi binaan/lokasi sementara atau outlet untuk memasarkan produk
- Perlunya peningkatan keterampilan dalam mengolah dan melakukan diversifikasi produk olahan hasil laut

RENCANA KERJA

1. Mendorong kreatifitas masyarakat dalam menciptakan jenis usaha baru dan penguatan kapasitas SDM pelaku wisata :
 - Pembentukan kelompok usaha wisata
 - Pelatihan & sertifikasi Bahasa Asing
2. Mendorong UMKM dlm peningkatan mutu dan keberagaman produk unggulan bagi pengrajin produk bercorak khas Kepulauan Seribu dengan:
 - Pelatihan produksi
 - Fasilitasi /pendampingan untuk permodalan dan teknis pemasaran
 - Penyediaan outlet/ kios yang memadai
3. Diversifikasi mata pencaharian (Mendorong nelayan agar beralih dari konsep nelayan tangkap menjadi nelayan budidaya), melalui:
 - Penyediaan Keramba Ikan.
 - Pelatihan teknis perikanan (Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah hasil perikanan)
 - Fasilitasi / pendampingan untuk teknis pemasaran
 - Pendampingan dlm permodalan atau pinjam bunga ringan dari Kementerian KKP berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Nelayan.



USULAN PENAMBAHAN WILAYAH ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU MELALUI PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN

DASAR PERTIMBANGAN URGENSI PENAMBAHAN WILAYAH KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU DARI BERBAGAI ASPEK

1

ASPEK HUKUM

- UU No. 23 Th. 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- KEPGUB DKI Jakarta No. 3 Th. 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan di Propinsi DKI Jakarta.
- PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- PERPRES No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur.
- Revisi PERDA DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 melalui Dinas Cipta Karta, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam pembahasannya belum mengatur pengawasan, pengendalian dan penetapan pulau reklamasi C, D, G, dan N.

2

ASPEK EKONOMI

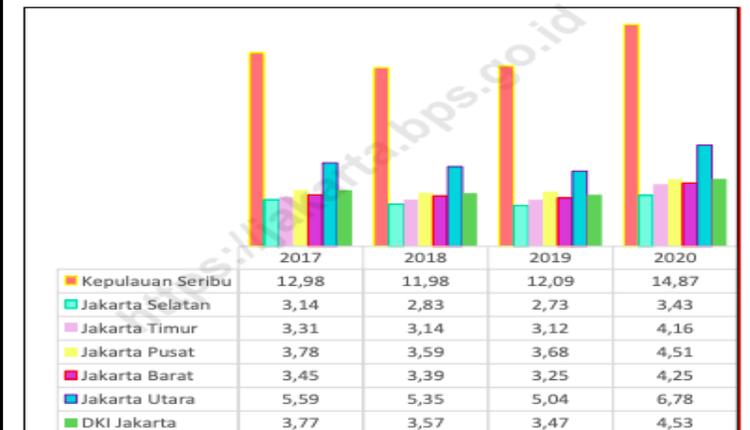
- Keterbatasan lahan daratan dan tidak ada pusat perekonomian serta bisnis berdampak terhadap lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas.
- Kecenderungan masyarakat yang mengandalkan Potensi SDA mengakibatkan kemiskinan terus meningkat (termiskin di Jakarta sesuai data BPS).
- Keterbatasan luasan wilayah daratan dan benturan peraturan mengakibatkan Nilai investasi dan Kontribusi PAD relatif sangat rendah.
- Tidak adanya wilayah penunjang perekonomian berdampak disparitas dalam pembangunan ekonomi di Kepulauan Seribu dg 5 wilayah kota.
- Pengembangan UMKM di wilayah Kepulauan Seribu yang cakupan konsumennya dalam skala kecil dan berbeda dengan 5 wilayah kota.
- Secara geografis kepulauan seribu terdiri dari pulau-pulau kecil yg mengandalkan transportasi laut serta keterbatasan operasional transportasi, menyebabkan masyarakat sulit berkembang.

3

ASPEK SOSIAL

- Terjadinya kesenjangan sosial di wilayah Administratif Kepulauan Seribu jika dibandingkan dengan wilayah darat DKI Jakarta.
- belum terkendalinya pertumbuhan penduduk dan Persebaran penduduk yang tidak merata setiap pulau di wilayah Kepulauan Seribu dikarenakan keterbatasan lahan daratan.

Perkembangan Kemiskinan Kab/Kota, 2020



Sumber: Susenas Maret 2020



DASAR PERTIMBANGAN URGENSI PENAMBAHAN WILAYAH KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU DARI BERBAGAI ASPEK

4 ASPEK BUDAYA

- Mainset dan perilaku mayoritas besar masyarakat Kepulauan Seribu yang memiliki kecenderungan mengharapkan bantuan.
- Masyarakat Kepulauan Seribu yang terisolir dalam suatu wilayah pulau cenderung kurang menerima terhadap budaya luar.



Adanya beberapa ras, suku maupun etnis dalam masyarakat Kepulauan Seribu yang menentukan suatu wilayah, berdasarkan hal tersebut maka masyarakat cenderung sulit menerima budaya luar hal ini di dukung oleh masyarakat yang menetap di wilauah pulau secara terus menerus (terisolir)

5 ASPEK PEMERINTAHAN DAN HANKAM

- Belum adanya unsur pimpinan daerah atau kantor pelayanan FORKOMINDA di Kepulauan Seribu mengingat tidak adanya lahan yang tersedia di wilayah Kepulauan Seribu.
- Pelayanan dalam sektor Pemerintahan yang kurang maksimal akibat terbatasnya mobilitas penduduk.
- Terhambatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi akibat terbatasnya jaringan telekomunikasi.



Perlu adanya kantor pelayanan lintas sektor di wilayah Kepulauan Seribu yang saat ini pelayanan cenderung dapat dilakukan di wilayah Jakarta Utara

6 ASPEK POLITIK

- Terhambatnya penyaluran penyampaian aspirasi masyarakat kepulauan seribu karena tidak ada Dapil khusus Kepulauan Seribu



Dibutuhkan keterwakilan khusus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari kepulauan seribu yang bertujuan untuk memperjuangan aspirasai masyarakat kepulauan seribu sehingga diperlukan dapil khusus Kepulauan Seribu dengan pertimbangan penambahan jumlah penduduk dan wilayah untuk menempati 1 kursi DPRD



Kepulauan Seribu sebagaimana telah ditetapkan sebagai **Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN)** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 serta sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha (*Ease Of Doing Business*)



Kepulauan Seribu yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi dalam pengembangan pariwisata nasional mempunyai pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.



TERIMA KASIH



Dr. Dadang Solihin, SE, MA

**Pencanangan Digital Islands sebagai
Langkah Awal Implementasi *Smart
Government* di Kepulauan Seribu**

**Seminar Online Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu
Jakarta, 23 Desember 2021**

Digital Islands



- Pada 7 Februari 2018 Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merencanakan program Digital Island. Program ini bertujuan untuk memberikan akses layanan digital di Kepulauan Seribu.
- Pada 31 Oktober 2019 Kepulauan Seribu telah dicanangkan sebagai Digital Islands oleh Bank Indonesia
- Tujuannya untuk meningkatkan berbagai akses produk dan layanan yang berbasis perbankan digital di Kepulauan Seribu.

Apa itu Smart Government?

- **Smart Government:** Istilah yang merujuk pada pengimplementasian ICT pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif.
- **Penyebabnya:**
 - V.U.C.A (Volatile, Uncertain, Complex, Ambigue)
 - B.A.N.I (Brittle, Anxiety, Non-Linear, Incomprehensible)
- **Caranya:** Dynamic Governance (Prof. Boon Siong Neo).
- **Prinsipnya:** Good Governance, yaitu interaksi antar stakeholders bersendikan nilai-nilai yang good.
- **Strateginya:** Innovation → One Stop Service, dll
- **Alatnya:** Digital Government.
- **Stakeholdersnya:** Pentahelix.



KOMINFO

Terima Kasih



Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Kota Jakarta Utara provinsi DKI Jakarta

**Implementation of One-Stop Services Policy In North Jakarta City,
Jakarta Province**

Tim peneliti

A.H. Rahadian, Mary Ismowati, M. Ali Massyhury, M. Rafi Suryadi

**Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI**

Publikasi Jurnal

Hasil penelitian ini telah di publikasi pada
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik
Volume 10 Number 2, July–December 2020. Page 381-388
p-ISSN: 2086-6364, e-ISSN: 2549-7499
Homepage: <http://ojs.unm.ac.id/iap>

Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pelayanan publik akan lebih efisien apabila diselenggarakan oleh suatu yuridiksi yang memiliki kontrol atas wilayah geografis tertentu sehingga memungkinkan optimalisasi manfaat dan biaya. Cara yang lebih efektif guna mempersempit jarak penyedia layanan terhadap penerima layanan adalah dengan melakukan desentralisasi pelayanan publik (*public services decentralization*) melalui *internal decentralization* dengan tujuan *empowering front line staff* menurut Pollitt, Birchall, dan Putman dalam Gurning (2013).

Latar Belakang Penelitian

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DKI Jakarta ditetapkan melalui PERDA Provinsi DKI Jakarta No.12 Tahun 2013 dilakukan dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan.

Jumlah unit PTSP meliputi 318 service poin yang berada di 247 Kelurahan, 44 Kecamatan, 6 Kabupaten/Kota dan 1 provinsi.

Terjadi perubahan kelembagaan pengelola PTSP

Melalui Pergub Prop DKI Jakarta No.281 tahun 2016 ditetapkan organisasi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam perubahan tersebut diatur susunan organisasi di tingkat provinsi, Unit Pelaksana PTSP di tingkat Kota/Kabupaten, Unit Pelaksana Kecamatan dan Unit Pelaksana PTSP Kelurahan.

Latar Belakang Penelitian

Fenomena Masalah

Dari hasil observasi, implementasi kebijakan PM-PTSP di Unit pelaksana Jakarta Utara, diketahui :

- Tingkat kepatuhan implementor belum sesuai harapan, hal ini ditandai oleh pelaksanaan proses penilaian teknis pada pelayanan perizinan yang masih bergantung pada instansi lain, tidak dilakukan secara mandiri
- Kualitas pelayanan belum sesuai harapan, hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya beberapa aduan masyarakat terkait proses pelayanan
- Rutinitas pelayanan masih menghadapi kendala berupa kendala jaringan untuk keperluan pelayanan daring yang disebabkan oleh keterbatasan bandwidth, server yang kurang besar serta koneksi jaringan yang kurang cepat
- Capaian kinerja tahun sebelumnya (2019) belum mencapai target yang ditetapkan didalam Rencana Kinerja.
- Hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tahun 2019 menilai masih banyak pemerintah daerah yang memandang keberadan Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk resentralisasi kewenangan perizinan. yaitu regulasi, sistem, dan tata laksana,"

Latar Belakang Penelitian

Fenomena Masalah

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau NSPK sektoral yang idealnya menjadi petunjuk teknis pelayanan izin, tidak secara jelas menerjemahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tentang OSS ke dalam prosedur yang mudah diikuti oleh semua wilayah.

"Disharmoni menyangkut kewenangan memberi izin yang sebelumnya di tangan kepala daerah sekarang berpindah ke lembaga OSS. Fungsi lembaga perizinan yang tadinya didelegasikan UU Penanaman Modal kepada PTSP sekarang bergeser ke lembaga OSS"

Kelemahan sistem OSS lainnya adalah fitur penentuan lokasi usaha yang belum sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta ketersediaan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

"Hal ini dapat berimplikasi pada pendirian lokasi usaha yang tidak sesuai dengan perencanaan daerah sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RTRW, atau bahkan tak berbasis lokasi lantaran ketiadaan RDTR"

Latar Belakang Penelitian

Fenomena Masalah

Pada aspek tata laksana, OSS juga masih menemui kendala, baik terjadi di tingkat pusat maupun daerah.

Pada tingkat pusat, sistem OSS belum terintegrasi utuh dengan sistem perizinan Kementerian/Lembaga.

Di daerah masih terlihat banyak Pemerintah Daerah yang memiliki sistem perizinan daerah mandiri berbasis-aplikasi (melalui PTSP) yang belum terintegrasi dengan lembaga OSS.

Bahkan di daerah bisnis utama seperti DKI Jakarta, baru mengintegrasikan JakEVO dan OSS hanya pada pelayanan perizinan SIUP. Izin-izin yang lain masih dilayani di sistem mandiri DKI Jakarta.

Implementasi Kebijakan

Dalam Policy Implementasi and Bureacracy menurut Randall B. Repley and Grace A. Franklin dalam Alfatih (2010), kinerja implementasi ditentukan oleh:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku

Perspektif pertama (*compliance perspective*), kepatuhan implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau program.

2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi

Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki

Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (*impact*) yang dikehendaki dari semua program-program yang dikehendaki.

Kualitas Pelayanan

Sebagai referensi penilaian, digunakan teori Parasuraman et al. dalam Jayanti (2016) kualitas pelayanan dapat dilihat dari lima dimensi antara lain:

1. Bukti Langsung (*Tangibles*) merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal.
2. Keandalan (*Reliability*) kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.
3. Ketanggapan (*Responsiveness*) merupakan suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas
4. Jaminan (*Assurance*) merupakan pengetahuan kesopansantunan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan
5. Empati (*Empathy*) merupakan pemberian perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen.

Kajian Pustaka

Kebijakan Layanan Online Single Submission (OSS)

Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk mempermudah pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya Izin Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya (BKPM).

Dasar PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Konsekuensinya seluruh peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dari pada Peraturan Pemerintah seperti: Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah harus mengikuti dan melakukan penyesuaian dengan sistem OSS.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan: Penelitian Kualitatif.

Creswell (2016:4) "Penelitian Kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang-dainggap dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam, yang dinyatakan oleh seorang responden maupun kelompok responden mengkomunikasikan bahan-bahan dan mendorong untuk didiskusikan secara bebas serta pewawancara sering kali dilatih untuk dapat menggali perasaan dan sikap yang tersembunyi dari responden (Ardianto, 2014:61).

Wawancara mendalam menekankan beberapa pengalaman individu yang menyajikan data berbentuk kata-kata maupun aktivitas-altivitas yang berfokus pada proses memahami bagaimana suatu fenomena muncul dan mencari solusi pemecahan masalahnya, namun penelitian kualitatif dapat saja menyajikan data berupa angka-angka apabila dalam suatu kondisi tertentu diperlukan.

Informan penelitian terdiri dari tujuh orang pegawai, yaitu lima orang ditingkat kota dan dua orang ditingkat kelurahan, sedangkan pengguna jasa pelayanan tujuh orang yaitu tiga orang ditingkat kota dan empat orang ditingkat kelurahan.

Hasil Penelitian

1. Pada implementasi kebijakan PM-PTSP di Kota Jakarta Utara, pada umumnya implementor telah memahami tugas dan fungsinya, namun dalam kelancaran tugasnya terkendala oleh kekurangan SDM baik kuantitas maupun kualitas, perangkat teknologi informasi yang belum mutakhir termasuk didalamnya ketersediaan tenaga teknologi informasi di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Pada penilaian kulaitas pelayanan publik oleh masyarakat, dengan menggunakan teori Servqual dari Parasuraman, dikemukakan memiliki tingkat tanggap dan empati yang cukup baik dan pelayanan telah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Dalam implementasi pelayanan publik, para administrator publik tidak hanya dituntut untuk kian mampu bekerja secara lebih profesional, efisien, ekonomis dan efektif, tetapi juga mampu mengembangkan pendekatan-pendekatan yang lebih inovatif guna menjawab tantangan-tantangan baru yang timbul pada aras global yang langsung atau tidak langsung berpengaruh pada lingkungan tugasnya.

Hasil Penelitian

2. Kebijakan OSS sesuai PP Nomor 24 Tahun 2018 belum sepenuhnya berjalan efektif, karena belum terintegrasi secara penuh dengan sistem perizinan yang ada di PM-PTSP DKI Jakarta, yaitu JakEVO dan dari kebijakan lisan Kepala Dinas hanya dilaksanakan ditingkat kelurahan.

Permasalahan utama sistem OSS, yaitu ketidaksesuaian regulasi tingkat pusat dengan daerah. Pedoman Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang menjadi petunjuk teknis pelayanan perizinan ternyata tidak konkret menerjemahkan Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Pelayanan Perizinan Terintegrasi Berbasis Elektronik (OSS).

Selain NSPK, permasalahan lain OSS juga terlihat dari tidak selarasnya PP 24/2018 dengan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Disharmonis ini menyangkut kewenangan pemberian izin yang sebelumnya berada di tangan kepala daerah menjadi lembaga OSS. Akibatnya, fungsi lembaga perizinan yang tadinya didelegasikan UU Penanaman Modal kepada PTSP sekarang bergeser ke lembaga OSS.

Hasil Penelitian

3. Hambatan utama dari implemtasi kebijakan, yaitu dari sisi SDM, status pegawai belum dialihkan menjadi jabatan fungsional sehingga mempengaruhi karir kepangkatan dan motivasi. Selain itu penetapan standar kompetensi SDM pelayanan beluma ada, hal ini berakibat capaian rencana kinerja (Renkin) untuk pelayanan system daring (online) tidak terlaksana sesuai target.

Hasil Penelitian

4. Solusi untuk mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan PM-PTSP di Jakarta Utara, sampai saat ini belum secara nyata dilakukan. Untuk mengatasinya perlu dilakukan bimbingan teknis pada seluruh implementor secara berjenjang dari tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Akan lebih efektif apabila didahului transformasi status kepegawaian dari struktural menjadi fungsional.

Saran

1. Pemerintah agar mengeluarkan peraturan turunan dari PP PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), yaitu dengan mengeluarkan kebijakan integrasi sistem online yang ada di Kementerian dan Pemerintah Daerah.
2. Untuk meningkatkan kinerja dan motivasi petugas Dinas PM-PTSP, agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta :
 - a. mengalihkan seluruh pegawai yang menangani pelayanan publik menjadi pegawai fungsional.
 - b. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pelayanan publik melalui berbagai pelatihan teknis pelayanan.
 - c. Melengkapi dan memperbaharui peralatan pelayanan terutama peralatan teknologi informasi
3. Dinas PM-PTSP Provinsi DKI Jakarta agar menetapkan petunjuk/pedoman umum dalam mengatasi masalah dan hambatan teknis operasional pelayanan.

Daftar Pustaka

- Alfatih. A. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Unpad Press.
- Ardianto, Elvinaro. 2014. *Research Methodology for Quantitative and Qualitative Public Relations*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Creswell, J. W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Izhandri, S. dan Harahap, D. A. OSS dan Perkembangannya di Indonesia
- Jayanti, D. W. Kualitas Pelayanan (Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty, Tangibles) Di Legend Premium Coffee Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Gurning, D. A. 2013. Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Siak. *Tesis*. Universitas Indonesia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

*WRAP UP –
SEMINAR ONLINE*

**Peningkatan Pelayanan di Kabupaten
Administratif Kepulauan Seribu**



<http://drdjakarta.id>

Modal Pembangunan Kep. Seribu



- Kepulauan Seribu memiliki 113 Pulau, terdiri dari 6 Kelurahan, 2 Kecamatan, ada taman nasional, 6 zona pulau RDTR, dan Zona Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat.
- Luas daratannya lebih sedikit daripada luas lautnya. Dari luas totalnya 7.006,48 km², luas daratan 9,98 km², dan luas lautnya sekitar 10xluas daratan kota Jakarta.
- Lahan darat yang sedikit ini menjadi kendala pengembangan/pembangunan infrastruktur untuk peningkatan ekonomi.
- Kepulauan Seribu sebelum tahun 2020 sudah ada pembangunan oleh KemenPUPR untuk mendukung program pariwisata nasional, namun setelah tahun 2020 agak terhambat kemungkinan karena adanya Pandemi Covid19.

Tantangan yang utama yang dihadapi di Kepulauan Seribu adalah:



1. Pengangguran tinggi menyebabkan penduduknya termiskin.
2. Infrastruktur/fasilitas yang dikembangkan untuk mengakomodir kunjungan wisata
3. Pengelolaan dan pengolahan sampah yang masih harus ditangani di daratan pulau, terkendala tidak terangkut oleh kapal pengangkut sampah ketika musim angin barat yang sering terjadi gelombang tinggi.
4. Beberapa Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) telah dibangun, dan masih perlu ditambah.
5. Masih memerlukan sistem peringatan dini bencana: puting beliung dan tsunami.
6. Masih diperlukan upaya perubahan mindset untuk mengejar ketertinggalan 20 tahun (merasa tidak maju-maju).
7. Sudah ada Grand Design dan Investor (konsorsium) yang siap membangun (Pak Bupati: “sayang bila tidak direalisasikan”) → Regulasi
8. Terkait KEK, sudah ditangani oleh Deputy Pengembangan Menko Ekonomi, dan akan disurvei apakah bisa menjadi KEK
9. Pendidikan tertinggi di Kep. Seribu SLTA → dibuka Perguruan Tinggi (bekerjasama dengan pesantren?)



Peningkatan yang telah dilakukan, contoh:

1. Kebutuhan akan listrik bagi penduduk di pulau terjauh telah bertahap dipenuhi.
2. Bekerjasama dengan Pertamina membangun Kampung Jepang, dimana sudah ditanami Pohon Bunga Sakura yang asli dari Jepang di Pantai Sakura.
→ Dari 1800 desa, masuk menjadi 50 besar
3. Telah membangun beberapa pantai ikonik untuk wisatawan, seperti Pantai Sunrise, Wisata Religi, dan lain sebagainya → akan diikuti lomba



Peningkatan yang perlu/akan dilakukan, seperti:

1. Kepulauan Seribu perlu menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan konsep “Digital Island”, mengadopsi negara “Maladewa”, yakni meningkatkan berbagai akses produk dan layanan yang berbasis perbankan digital di Kepulauan Seribu yang bisa menciptakan banyak lapangan kerja.
2. Pengembangan metodologi pemerintahan dengan “Smart Government” dimana mengimplementasikan ICT pada layanan di bidang pemerintahan secara efektif dengan cara menyediakan “One Stop Services”.
3. Dilakukan penyusunan “roadmap” bagaimana dan kapan secara bertahap menuju ke arah “Smart Government”, dengan menggandeng stake holder pentahelix (multipihak) dimana unsur Pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu).

Lain-lain



1. Bu Sukma:

Marves hanya meng-cover lima super-prioritas destinasi. →KEK akan menempatkan penguasaan lahan ke swasta sehingga perlu pertimbangan.

Kep. Seribu sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata

Perlu dikomunikasikan dg kementerian, jangan sampai ketinggalan dg Babel

2. Pak Emir,

terkait investasi, ada dua kemungkinan: konglomerasi yg menguasai seluruh tempat atau pendapatan pendapatan daerah. Agar dari awal sudah harus diketatkan sehingga bisa mendekati 100%

→ Masih banyak sumber retribusi yang belum tertangani (parkir kapal). Di sisi lain banyak pulau tidak berfungsi karena pajak terlalu tinggi. Banyak pejabat yang belum turun ke lapangan.

3. Dr. Mary Ismowa. Pentahelix sudah dilakukan pemerintah, intinya sama namun perlu dipertimbangkan Media Sosial sebagai Pentahelix kelima.

Terima kasih

Quote Pak Bupati:

“Kalau mau maju, maju sekalian”



<http://drdjakarta.id>

Wo oo woyo iyo iyo iyo
Wo oo woyo ke pulau seribu
Yo yo ayo ayo
Ayo bersama kita melepas jenuh

Manjakan mata birukan hati
Ayo bersama-sama ringankan tangan
Pastikan biru laut tak menjelma
Hitam egghh...!!

Melaju perahuku melaju
Meninggalkan kesibukan jakarta
Berayun-ayun tubuhku berayun
Menuju kepulauan seribu

Melayang anganku di biru lautmu
Mengurai waktu ikuti rasa cinta
Berdamai dengan alam
Berdamai dengan kehidupan ye eee



**DEWAN RISET DAERAH (DRD)
PROVINSI DKI JAKARTA**

Sekretariat :

Gd. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Lt.8

Jl.Taman Jatibaru No.1 Tanah Abang Telp : 021-22038313

email: drd_jakarta@yahoo.co.id

Nomor : 186/DRD-DKI/XII/21
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan memberikan sambutan

Jakarta, 17 Desember 2021

Kepada Yth:

**Bapak Bupati Kepulauan Seribu
Provinsi DKI Jakarta**

Di

Tempat

Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan Seminar Online (Webminar) bertajuk "**Peningkatan Pelayanan Di Kepulauan Seribu**", yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Desember 2021
Pukul : 13.00 – 17.00 WIB
Tempat : Platform Zoom

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya Bapak Bupati Kepulauan Seribu berkenan memberikan sambutan pada acara Webminar Online tersebut. Webminar ini merupakan lanjutan dari Seminar online yang pernah diselenggarakan pada 23 Desember 2020 yang lalu. Sebagai narahubung lebih lanjut adalah Dr.Ing.Widodo Setiyo Pranowo (082111637144) dan Dr. Resista Vikaliana (081296244431).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua

Prof.Kemas Ridwan Kurniawan, S.T, M.Sc, Ph.D

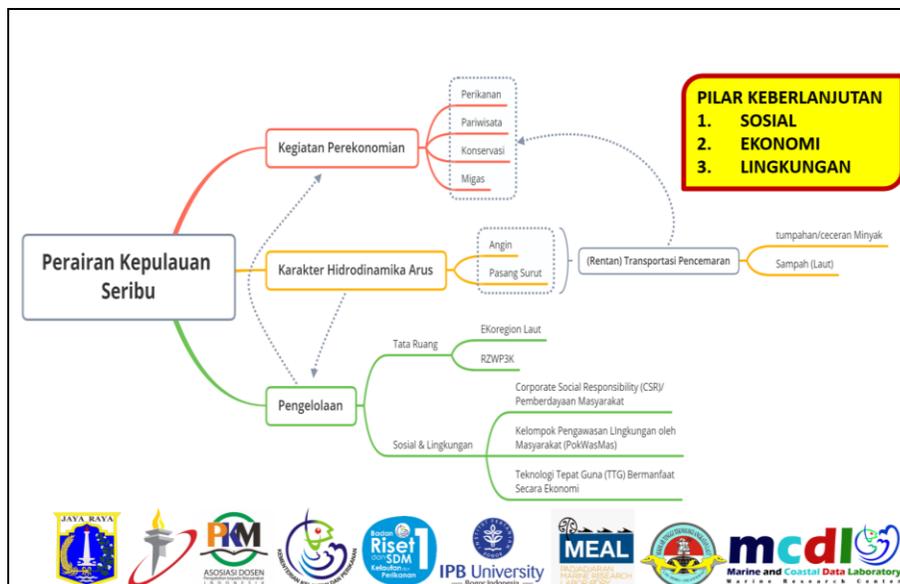
Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala UPT Pusat Inovasi Pengembangan dan Perkotaan Bappeda Provinsi DKI Jakarta

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) TA. 2021 WEBMINAR (SEMINAR ONLINE) PENINGKATAN PELAYANAN DI KEPULAUAN SERIBU

PENDAHULUAN

Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta periode 2018-2022 pada Tahun Anggaran 2020 telah sukses menyelenggarakan SEMINAR ONLINE bertajuk “Kolaborasi Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dosen Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Seribu” yang dilaksanakan pada 23 Desember 2020. Bupati Kepulauan Seribu, Bapak Junaedi S.Sos, MSi, pada Seminar Online tersebut menyampaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu yang bisa dikatakan masih tertinggal, dibandingkan dengan masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta secara umum. Ada banyak permasalahan yang terjadi di Kepulauan Seribu, baik isu lingkungan, sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut, menurut Heru Susetyo, S.H., L.L.M, Ph.D selaku anggota Komisi I DRD, merupakan suatu tantangan dan sekaligus peluang bagi DRD dan para kolaboratornya untuk berusaha membangun ekosistem kebijakan yang dapat dipergunakan guna percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu, melalui pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi, harus didasarkan kepada potensi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam laut dan pesisir, serta mempertimbangkan adanya kerentanan dari pencemaran, seperti yang dipaparkan oleh Dr.-Ing. Widodo S. Pranowo yang salah satu anggota Komisi I DRD DKI Jakarta. Pembangunan lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu, tidak bisa hanya dikerjakan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Seribu saja, melainkan perlu dukungan kolaborasi berbagai pihak, salah satunya adalah Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Indonesia (ADPI) cabang DKI Jakarta, seperti yang disampaikan oleh Dr. Nur Aini selaku Bendahara ADPI dan Dosen ITB Ahmad Dahlan. Resume dan rekomendasi dari seminar online tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Resume dan rekomendasi dari Seminar Online DRD DKI Jakarta pada 23 Desember 2020

Berdasarkan capaian SEMINAR ONLINE pada tahun 2020 tersebut, maka perlu ditindaklanjuti dengan SEMINAR ONLINE (WEBMINAR) lanjutan untuk menajamkan pembahasan salah satu aspek yang penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. Seminar online (Webminar) lanjutan yang diusulkan untuk diselenggarakan pada Tahun Anggaran 2021 ini adalah membahas tentang “Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu”.

MAKSUD

Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta, pada Tahun Anggaran 2021, bermaksud untuk menyelenggarakan Seminar online (Webminar) tentang “Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu”. Webminar ini memiliki fungsi yang sangat strategis antara lain: sebagai media pengumpul data dan informasi dari narasumber yang terpercaya; sebagai media diskusi public yang terakuntabilitas; sebagai salah satu media diskusi ilmiah dalam rangka proses penyusunan Policy Brief yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan juga sebagai media *public outreach* hasil riset DRD DKI Jakarta kepada masyarakat.

TUJUAN

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Menyelenggarakan Seminar Online (Webminar) tentang Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu.
2. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan Seminar Online (Webminar) tersebut sebagai salah satu bahan masukan untuk penyusunan Policy Brief Besar yang sedang disusun oleh DRD DKI Jakarta tentang kebijakan pembangunan lingkungan-sosial-ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu.

TARGET NARASUMBER

Adapun yang ditargetkan menjadi Narasumber adalah:

1. Perwakilan dari Pemda Kabupaten Kepulauan Seribu yang membidangi pelayanan publik: untuk Kesejahteraan masyarakat, dan Penanaman Modal.
2. Anggota DRD DKI Jakarta yang membidangi kebijakan/hukum tentang pelayanan publik.
3. Peneliti dan/atau Akademisi Perguruan Tinggi yang membidangi peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil.

TARGET PESERTA

Adapun jumlah peserta Seminar Online (Webminar) minimal adalah 100 peserta yang terdiri dari masyarakat umum, LSM, peneliti, akademisi yang memiliki perhatian positif kepada Kepulauan Seribu; staf pemangku kebijakan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta dan kabupaten Kepulauan Seribu.

RENCANA JADWAL

Adapun Seminar Online (Webminar) rencana diselenggarakan pada 23 Desember 2021 dengan rencana jadwal sebagai berikut:

WAKTU [WIB]	KEGIATAN	PIC/NARASUMBER
12.55 – 13.00	Peserta dan Narasumber memasuki waiting room zoom yang terpisah.	PIC: Panitia
13.00 – 13.20	Peserta dan Narasumber memasuki main room zoom seminar online.	PIC: Panitia dan Pembawa Acara
SESI I: SAMBUTAN-SAMBUTAN		
13.20 – 13.30	Sambutan dari Ketua DRD DKI Jakarta	Prof. Dr. Ir. Kemas Ridwan, M.Sc
13.30 – 14.00	Sambutan dari Bupati Kepulauan Seribu/ yang mewakili	Bapak. JUNAEDI, S.Sos, M.Si
14.00 – 14.10	Foto Bersama	
SESI II: PELAYANAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KEPULAUAN SERIBU		
14.10 – 14.40	Pelayanan public untuk kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Seribu	Perwakilan dari Pemkab Kepulauan Seribu
14.40 – 15.10	Pelayanan penanaman modal di Kepulauan Seribu	Perwakilan dari Pemkab Kepulauan Seribu
15.10 – 15.40	Pelayanan Publik/ Penanaman Modal di Kepulauan Seribu ditinjau secara akademis	Akademisi/ Peneliti
15.40 – 16.10	Kebijakan/hukum tentang pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta dan/atau Kepulauan Seribu	Anggota DRD DKI Jakarta
SESI III: DISKUSI, WRAP UP DAN PENUTUP		
16.10 – 16.45	Diskusi	
16.45 – 17.00	Wrap Up dan Penutup	Ketua Komisi I DRD DKI Jakarta



**DEWAN RISET DAERAH (DRD)
PROVINSI DKI JAKARTA**

Sekretariat :

Gd. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Lt.8

Jl.Taman Jatibaru No.1 Tanah Abang Telp : 021-22038313

email: drd_jakarta@yahoo.co.id

Nomor : 185/DRD-DKI/XII/21
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan sebagai Narasumber

Jakarta, 17 Desember 2021

Kepada Yth:
Bapak Bupati Kepulauan Seribu
Provinsi DKI Jakarta
Di
Tempat

Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan Seminar online (Webminar) bertajuk **“Peningkatan Pelayanan Di Kepulauan Seribu”**, yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Desember 2021
Pukul : 13.00 – 17.00 WIB
Tempat : Platform Zoom

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya Bapak Bupati Kepulauan Seribu berkenan menjadi Nara Sumber dengan menyampaikan materi antara lain “Berbagai Pelayanan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu kepada masyarakat, seperti: Berbagai Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat, dan Penanaman Modal. Tantangan, Keberhasilan, dan apakah masih terdapat kendala yang masih belum bisa ditangani, yang mungkin membutuhkan kolaborasi dari pihak-pihak lain bisa menjadi bahan paparan.

Webminar ini merupakan lanjutan dari Seminar online yang pernah diselenggarakan pada 23 Desember 2020 yang lalu. Sebagai bahan masukan untuk materi presentasi kami sertakan TOR FGD dan Susunan Acara (terlampir). Sebagai narahubung lebih lanjut adalah Dr.Ing.Widodo Setiyo Pranowo (082111637144) dan Dr. Resista Vikaliana (081296244431).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
Ketua

Prof.Kemas Ridwan Kurniawan, S.T, M.Sc, Ph.D

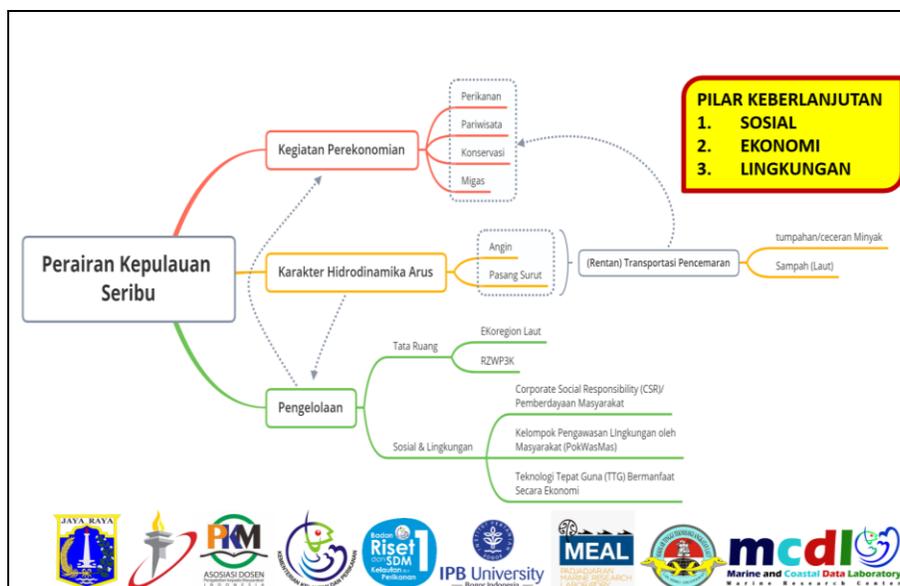
Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala UPT Pusat Inovasi Pengembangan dan Perkotaan Bappeda Provinsi DKI Jakarta

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*) TA. 2021 WEBMINAR (SEMINAR ONLINE) PENINGKATAN PELAYANAN DI KEPULAUAN SERIBU

PENDAHULUAN

Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta periode 2018-2022 pada Tahun Anggaran 2020 telah sukses menyelenggarakan SEMINAR ONLINE bertajuk “Kolaborasi Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dosen Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Seribu” yang dilaksanakan pada 23 Desember 2020. Bupati Kepulauan Seribu, Bapak Junaedi S.Sos, MSi, pada Seminar Online tersebut menyampaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu yang bisa dikatakan masih tertinggal, dibandingkan dengan masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta secara umum. Ada banyak permasalahan yang terjadi di Kepulauan Seribu, baik isu lingkungan, sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut, menurut Heru Susetyo, S.H., L.L.M, Ph.D selaku anggota Komisi I DRD, merupakan suatu tantangan dan sekaligus peluang bagi DRD dan para kolaboratornya untuk berusaha membangun ekosistem kebijakan yang dapat dipergunakan guna percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu, melalui pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi, harus didasarkan kepada potensi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam laut dan pesisir, serta mempertimbangkan adanya kerentanan dari pencemaran, seperti yang dipaparkan oleh Dr.-Ing. Widodo S. Pranowo yang salah satu anggota Komisi I DRD DKI Jakarta. Pembangunan lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu, tidak bisa hanya dikerjakan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Seribu saja, melainkan perlu dukungan kolaborasi berbagai pihak, salah satunya adalah Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Indonesia (ADPI) cabang DKI Jakarta, seperti yang disampaikan oleh Dr. Nur Aini selaku Bendahara ADPI dan Dosen ITB Ahmad Dahlan. Resume dan rekomendasi dari seminar online tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Resume dan rekomendasi dari Seminar Online DRD DKI Jakarta pada 23 Desember 2020

Berdasarkan capaian SEMINAR ONLINE pada tahun 2020 tersebut, maka perlu ditindaklanjuti dengan SEMINAR ONLINE (WEBMINAR) lanjutan untuk menajamkan pembahasan salah satu aspek yang penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. Seminar online (Webminar) lanjutan yang diusulkan untuk diselenggarakan pada Tahun Anggaran 2021 ini adalah membahas tentang “Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu”.

MAKSUD

Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta, pada Tahun Anggaran 2021, bermaksud untuk menyelenggarakan Seminar online (Webminar) tentang “Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu”. Webminar ini memiliki fungsi yang sangat strategis antara lain: sebagai media pengumpul data dan informasi dari narasumber yang terpercaya; sebagai media diskusi public yang terakuntabilitas; sebagai salah satu media diskusi ilmiah dalam rangka proses penyusunan Policy Brief yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan juga sebagai media *public outreach* hasil riset DRD DKI Jakarta kepada masyarakat.

TUJUAN

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Menyelenggarakan Seminar Online (Webminar) tentang Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu.
2. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan Seminar Online (Webminar) tersebut sebagai salah satu bahan masukan untuk penyusunan Policy Brief Besar yang sedang disusun oleh DRD DKI Jakarta tentang kebijakan pembangunan lingkungan-sosial-ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu.

TARGET NARASUMBER

Adapun yang ditargetkan menjadi Narasumber adalah:

1. Perwakilan dari Pemda Kabupaten Kepulauan Seribu yang membidangi pelayanan publik: untuk Kesejahteraan masyarakat, dan Penanaman Modal.
2. Anggota DRD DKI Jakarta yang membidangi kebijakan/hukum tentang pelayanan publik.
3. Peneliti dan/atau Akademisi Perguruan Tinggi yang membidangi peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil.

TARGET PESERTA

Adapun jumlah peserta Seminar Online (Webminar) minimal adalah 100 peserta yang terdiri dari masyarakat umum, LSM, peneliti, akademisi yang memiliki perhatian positif kepada Kepulauan Seribu; staf pemangku kebijakan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta dan kabupaten Kepulauan Seribu.

RENCANA JADWAL

Adapun Seminar Online (Webminar) rencana diselenggarakan pada 23 Desember 2021 dengan rencana jadwal sebagai berikut:

WAKTU [WIB]	KEGIATAN	PIC/NARASUMBER
12.55 – 13.00	Peserta dan Narasumber memasuki waiting room zoom yang terpisah.	PIC: Panitia
13.00 – 13.20	Peserta dan Narasumber memasuki main room zoom seminar online.	PIC: Panitia dan Pembawa Acara
SESI I: SAMBUTAN-SAMBUTAN		
13.20 – 13.30	Sambutan dari Ketua DRD DKI Jakarta	Prof. Dr. Ir. Kemas Ridwan, M.Sc
13.30 – 14.00	Sambutan dari Bupati Kepulauan Seribu/ yang mewakili	Bapak. JUNAEDI, S.Sos, M.Si
14.00 – 14.10	Foto Bersama	
SESI II: PELAYANAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KEPULAUAN SERIBU		
14.10 – 14.40	Pelayanan public untuk kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Seribu	Perwakilan dari Pemkab Kepulauan Seribu
14.40 – 15.10	Pelayanan penanaman modal di Kepulauan Seribu	Perwakilan dari Pemkab Kepulauan Seribu
15.10 – 15.40	Pelayanan Publik/ Penanaman Modal di Kepulauan Seribu ditinjau secara akademis	Akademisi/ Peneliti
15.40 – 16.10	Kebijakan/hukum tentang pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta dan/atau Kepulauan Seribu	Anggota DRD DKI Jakarta
SESI III: DISKUSI, WRAP UP DAN PENUTUP		
16.10 – 16.45	Diskusi	
16.45 – 17.00	Wrap Up dan Penutup	Ketua Komisi I DRD DKI Jakarta



**DEWAN RISET DAERAH (DRD)
PROVINSI DKI JAKARTA**

Sekretariat :

Gd. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Lt.8

Jl.Taman Jatibaru No.1 Tanah Abang Telp : 021-22038313

email: drd_jakarta@yahoo.co.id

Nomor : 187/DRD-DKI/XII/21
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan sebagai Narasumber

Jakarta, 17 Desember 2021

Kepada Yth:

Dr.Ahmad Hidayat Rahadian

Program Pasca Sarjana Magister

Administrasi Publik Institut STIAM I

Di

Tempat

Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan Seminar online (Webminar) bertajuk "**Peningkatan Pelayanan Di Kepulaun Seribu**", yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Desember 2021
Pukul : 13.00 – 17.00 WIB
Tempat : Platform Zoom

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya Bapak Dr.Ahmad Hidayat Rahadian berkenan menjadi Nara Sumber Webminar tersebut diatas. Webminar ini merupakan lanjutan dari Seminar online yang pernah diselenggarakan pada 23 Desember 2020 yang lalu. Sebagai bahan masukan untuk materi presentasi kami sertakan TOR FGD dan Susunan Acara (terlampir). Sebagai narahubung lebih lanjut adalah Dr.Ing.Widodo Setiyo Pranowo (082111637144) dan Dr. Resista Vikaliana (081296244431).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua

Prof.Kemas Ridwan Kurniawan, S.T, M.Sc, Ph.D

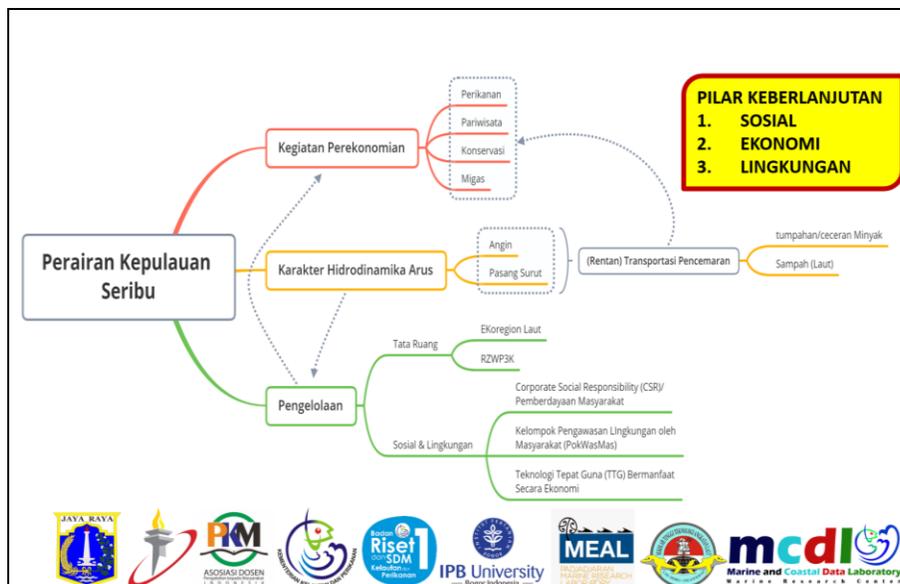
Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala UPT Pusat Inovasi Pengembangan dan Perkotaan Bappeda Provinsi DKI Jakarta

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) TA. 2021 WEBMINAR (SEMINAR ONLINE) PENINGKATAN PELAYANAN DI KEPULAUAN SERIBU

PENDAHULUAN

Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta periode 2018-2022 pada Tahun Anggaran 2020 telah sukses menyelenggarakan SEMINAR ONLINE bertajuk “Kolaborasi Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dosen Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Seribu” yang dilaksanakan pada 23 Desember 2020. Bupati Kepulauan Seribu, Bapak Junaedi S.Sos, MSi, pada Seminar Online tersebut menyampaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu yang bisa dikatakan masih tertinggal, dibandingkan dengan masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta secara umum. Ada banyak permasalahan yang terjadi di Kepulauan Seribu, baik isu lingkungan, sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut, menurut Heru Susetyo, S.H., L.L.M, Ph.D selaku anggota Komisi I DRD, merupakan suatu tantangan dan sekaligus peluang bagi DRD dan para kolaboratornya untuk berusaha membangun ekosistem kebijakan yang dapat dipergunakan guna percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu, melalui pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi, harus didasarkan kepada potensi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam laut dan pesisir, serta mempertimbangkan adanya kerentanan dari pencemaran, seperti yang dipaparkan oleh Dr.-Ing. Widodo S. Pranowo yang salah satu anggota Komisi I DRD DKI Jakarta. Pembangunan lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu, tidak bisa hanya dikerjakan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Seribu saja, melainkan perlu dukungan kolaborasi berbagai pihak, salah satunya adalah Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Indonesia (ADPI) cabang DKI Jakarta, seperti yang disampaikan oleh Dr. Nur Aini selaku Bendahara ADPI dan Dosen ITB Ahmad Dahlan. Resume dan rekomendasi dari seminar online tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Resume dan rekomendasi dari Seminar Online DRD DKI Jakarta pada 23 Desember 2020

Berdasarkan capaian SEMINAR ONLINE pada tahun 2020 tersebut, maka perlu ditindaklanjuti dengan SEMINAR ONLINE (WEBMINAR) lanjutan untuk menajamkan pembahasan salah satu aspek yang penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. Seminar online (Webminar) lanjutan yang diusulkan untuk diselenggarakan pada Tahun Anggaran 2021 ini adalah membahas tentang “Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu”.

MAKSUD

Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta, pada Tahun Anggaran 2021, bermaksud untuk menyelenggarakan Seminar online (Webminar) tentang “Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu”. Webminar ini memiliki fungsi yang sangat strategis antara lain: sebagai media pengumpul data dan informasi dari narasumber yang terpercaya; sebagai media diskusi public yang terakuntabilitas; sebagai salah satu media diskusi ilmiah dalam rangka proses penyusunan Policy Brief yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan juga sebagai media *public outreach* hasil riset DRD DKI Jakarta kepada masyarakat.

TUJUAN

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Menyelenggarakan Seminar Online (Webminar) tentang Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu.
2. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan Seminar Online (Webminar) tersebut sebagai salah satu bahan masukan untuk penyusunan Policy Brief Besar yang sedang disusun oleh DRD DKI Jakarta tentang kebijakan pembangunan lingkungan-sosial-ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu.

TARGET NARASUMBER

Adapun yang ditargetkan menjadi Narasumber adalah:

1. Perwakilan dari Pemda Kabupaten Kepulauan Seribu yang membidangi pelayanan publik: untuk Kesejahteraan masyarakat, dan Penanaman Modal.
2. Anggota DRD DKI Jakarta yang membidangi kebijakan/hukum tentang pelayanan publik.
3. Peneliti dan/atau Akademisi Perguruan Tinggi yang membidangi peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil.

TARGET PESERTA

Adapun jumlah peserta Seminar Online (Webminar) minimal adalah 100 peserta yang terdiri dari masyarakat umum, LSM, peneliti, akademisi yang memiliki perhatian positif kepada Kepulauan Seribu; staf pemangku kebijakan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta dan kabupaten Kepulauan Seribu.

RENCANA JADWAL

Adapun Seminar Online (Webminar) rencana diselenggarakan pada 23 Desember 2021 dengan rencana jadwal sebagai berikut:

WAKTU [WIB]	KEGIATAN	PIC/NARASUMBER
12.55 – 13.00	Peserta dan Narasumber memasuki waiting room zoom yang terpisah.	PIC: Panitia
13.00 – 13.20	Peserta dan Narasumber memasuki main room zoom seminar online.	PIC: Panitia dan Pembawa Acara
SESI I: SAMBUTAN-SAMBUTAN		
13.20 – 13.30	Sambutan dari Ketua DRD DKI Jakarta	Prof. Dr. Ir. Kemas Ridwan, M.Sc
13.30 – 14.00	Sambutan dari Bupati Kepulauan Seribu/ yang mewakili	Bapak. JUNAEDI, S.Sos, M.Si
14.00 – 14.10	Foto Bersama	
SESI II: PELAYANAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KEPULAUAN SERIBU		
14.10 – 14.40	Pelayanan public untuk kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Seribu	Perwakilan dari Pemkab Kepulauan Seribu
14.40 – 15.10	Pelayanan penanaman modal di Kepulauan Seribu	Perwakilan dari Pemkab Kepulauan Seribu
15.10 – 15.40	Pelayanan Publik/ Penanaman Modal di Kepulauan Seribu ditinjau secara akademis	Akademisi/ Peneliti
15.40 – 16.10	Kebijakan/hukum tentang pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta dan/atau Kepulauan Seribu	Anggota DRD DKI Jakarta
SESI III: DISKUSI, WRAP UP DAN PENUTUP		
16.10 – 16.45	Diskusi	
16.45 – 17.00	Wrap Up dan Penutup	Ketua Komisi I DRD DKI Jakarta



**DEWAN RISET DAERAH (DRD)
PROVINSI DKI JAKARTA**

Sekretariat :

Gd. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Lt.8

Jl.Taman Jatibaru No.1 Tanah Abang Telp : 021-22038313

email: drd_jakarta@yahoo.co.id

Nomor : 192/DRD-DKI/XII/21
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan sebagai Narasumber

Jakarta, 20 Desember 2021

Kepada Yth:
Dr.H.Dadang Solihin, SE, MA
Di
Tempat

Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan Seminar online (Webminar) bertajuk **“Peningkatan Pelayanan Di Kepulauan Seribu”**, yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Desember 2021
Pukul : 13.00 – 17.00 WIB
Tempat : Platform Zoom

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya Bapak Dr.H.Dadang Solihin, SE, MA berkenan menjadi Nara Sumber Webminar tersebut diatas. Webminar ini merupakan lanjutan dari Seminar online yang pernah diselenggarakan pada 23 Desember 2020 yang lalu. Sebagai bahan masukan untuk materi presentasi kami sertakan TOR FGD dan Susunan Acara (terlampir). Sebagai narahubung lebih lanjut adalah Dr.Ing.Widodo Setiyo Pranowo (082111637144) dan Dr. Resista Vikaliana (081296244431).

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA

Ketua

Prof.Kemas Ridwan Kurniawan, S.T, M.Sc, Ph.D

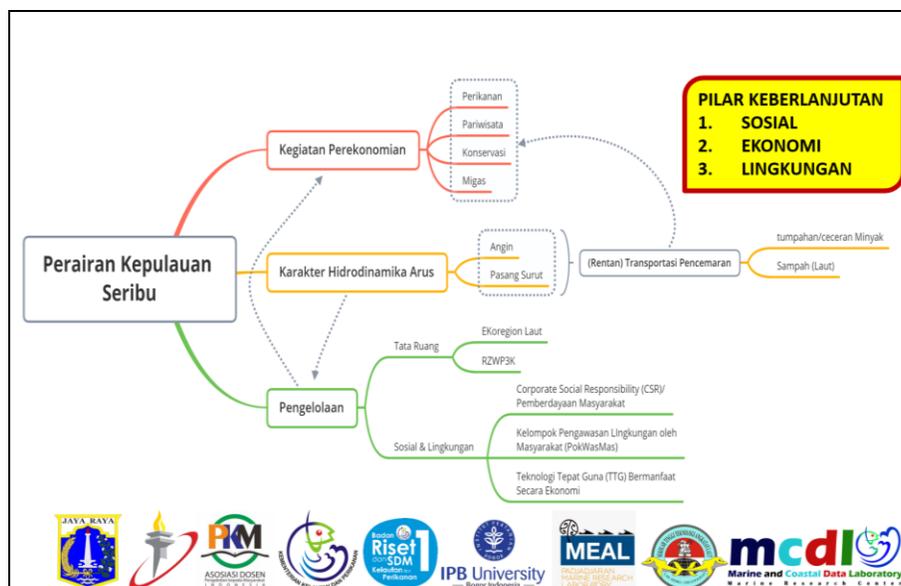
Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala UPT Pusat Inovasi Pengembangan dan Perkotaan Bappeda Provinsi DKI Jakarta

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*) TA. 2021 WEBMINAR (SEMINAR ONLINE) PENINGKATAN PELAYANAN DI KEPULAUAN SERIBU

PENDAHULUAN

Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta periode 2018-2022 pada Tahun Anggaran 2020 telah sukses menyelenggarakan SEMINAR ONLINE bertajuk “Kolaborasi Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dosen Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Seribu” yang dilaksanakan pada 23 Desember 2020. Bupati Kepulauan Seribu, Bapak Junaedi S.Sos, MSi, pada Seminar Online tersebut menyampaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu yang bisa dikatakan masih tertinggal, dibandingkan dengan masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta secara umum. Ada banyak permasalahan yang terjadi di Kepulauan Seribu, baik isu lingkungan, sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut, menurut Heru Susetyo, S.H., L.L.M, Ph.D selaku anggota Komisi I DRD, merupakan suatu tantangan dan sekaligus peluang bagi DRD dan para kolaboratornya untuk berusaha membangun ekosistem kebijakan yang dapat dipergunakan guna percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu, melalui pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi, harus didasarkan kepada potensi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam laut dan pesisir, serta mempertimbangkan adanya kerentanan dari pencemaran, seperti yang dipaparkan oleh Dr.-Ing. Widodo S. Pranowo yang salah satu anggota Komisi I DRD DKI Jakarta. Pembangunan lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu, tidak bisa hanya dikerjakan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Seribu saja, melainkan perlu dukungan kolaborasi berbagai pihak, salah satunya adalah Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Indonesia (ADPI) cabang DKI Jakarta, seperti yang disampaikan oleh Dr. Nur Aini selaku Bendahara ADPI dan Dosen ITB Ahmad Dahlan. Resume dan rekomendasi dari seminar online tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Resume dan rekomendasi dari Seminar Online DRD DKI Jakarta pada 23 Desember 2020

Berdasarkan capaian SEMINAR ONLINE pada tahun 2020 tersebut, maka perlu ditindaklanjuti dengan SEMINAR ONLINE (WEBMINAR) lanjutan untuk menajamkan pembahasan salah satu aspek yang penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. Seminar online (Webminar) lanjutan yang diusulkan untuk diselenggarakan pada Tahun Anggaran 2021 ini adalah membahas tentang “Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu”.

MAKSUD

Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta, pada Tahun Anggaran 2021, bermaksud untuk menyelenggarakan Seminar online (Webminar) tentang “Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu”. Webminar ini memiliki fungsi yang sangat strategis antara lain: sebagai media pengumpul data dan informasi dari narasumber yang terpercaya; sebagai media diskusi public yang terakuntabilitas; sebagai salah satu media diskusi ilmiah dalam rangka proses penyusunan Policy Brief yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan juga sebagai media *public outreach* hasil riset DRD DKI Jakarta kepada masyarakat.

TUJUAN

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Menyelenggarakan Seminar Online (Webminar) tentang Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu.
2. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan Seminar Online (Webminar) tersebut sebagai salah satu bahan masukan untuk penyusunan Policy Brief Besar yang sedang disusun oleh DRD DKI Jakarta tentang kebijakan pembangunan lingkungan-sosial-ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu.

TARGET NARASUMBER

Adapun yang ditargetkan menjadi Narasumber adalah:

1. Perwakilan dari Pemda Kabupaten Kepulauan Seribu yang membidangi pelayanan publik: untuk Kesejahteraan masyarakat, dan Penanaman Modal.
2. Anggota DRD DKI Jakarta yang membidangi kebijakan/hukum tentang pelayanan publik.
3. Peneliti dan/atau Akademisi Perguruan Tinggi yang membidangi peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil.

TARGET PESERTA

Adapun jumlah peserta Seminar Online (Webminar) minimal adalah 100 peserta yang terdiri dari masyarakat umum, LSM, peneliti, akademisi yang memiliki perhatian positif kepada Kepulauan Seribu; staf pemangku kebijakan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta dan kabupaten Kepulauan Seribu.

RENCANA JADWAL

Adapun Seminar Online (Webminar) rencana diselenggarakan pada 23 Desember 2021 dengan rencana jadwal sebagai berikut:

WAKTU [WIB]	KEGIATAN	PIC/NARASUMBER
12.55 – 13.00	Peserta dan Narasumber memasuki waiting room zoom yang terpisah.	PIC: Panitia
13.00 – 13.20	Peserta dan Narasumber memasuki main room zoom seminar online.	PIC: Panitia dan Pembawa Acara
SESI I: SAMBUTAN-SAMBUTAN		
13.20 – 13.30	Sambutan dari Ketua DRD DKI Jakarta	Prof. Dr. Ir. Kemas Ridwan, M.Sc
13.30 – 14.00	Sambutan dari Bupati Kepulauan Seribu/ yang mewakili	Bapak. JUNAEDI, S.Sos, M.Si
14.00 – 14.10	Foto Bersama	
SESI II: PELAYANAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KEPULAUAN SERIBU		
14.10 – 14.40	Pelayanan public untuk kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Seribu	Perwakilan dari Pemkab Kepulauan Seribu
14.40 – 15.10	Pelayanan penanaman modal di Kepulauan Seribu	Perwakilan dari Pemkab Kepulauan Seribu
15.10 – 15.40	Pelayanan Publik/ Penanaman Modal di Kepulauan Seribu ditinjau secara akademis	Akademisi/ Peneliti
15.40 – 16.10	Kebijakan/hukum tentang pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta dan/atau Kepulauan Seribu	Anggota DRD DKI Jakarta
SESI III: DISKUSI, WRAP UP DAN PENUTUP		
16.10 – 16.45	Diskusi	
16.45 – 17.00	Wrap Up dan Penutup	Ketua Komisi I DRD DKI Jakarta



**DEWAN RISET DAERAH (DRD)
PROVINSI DKI JAKARTA**

Sekretariat : Gd. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
Jl.Taman Jatibaru No.1 Tanah Abang Telp:021-22038313 email: drd_jakarta@yahoo.co.id

Nomor : 197/DRD-DKI/XII/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan sebagai Moderator

Jakarta, 20 Desember 2021

Kepada Yth :
Drs.Teguh Imam Perdana, M.Si
Di
Jakarta

Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang “**Pelayanan Peningkatan di Kepulauan Seribu**”, yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23 Desember 2021
Pukul : 13.00 - 17.00 WIB
Meeting ID : 82687458387
Password : DRDKOM1
Tempat : Platform Zoom

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya Ibu Resista Vikaliana, S.Si, MM berkenan menjadi Moderator FGD tersebut diatas, kami sertakan juga TOR FGD dan Susunan Acara (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
Ketua

Prof.Kemas Ridwan Kurniawan, S.T, M.Sc, Ph.D

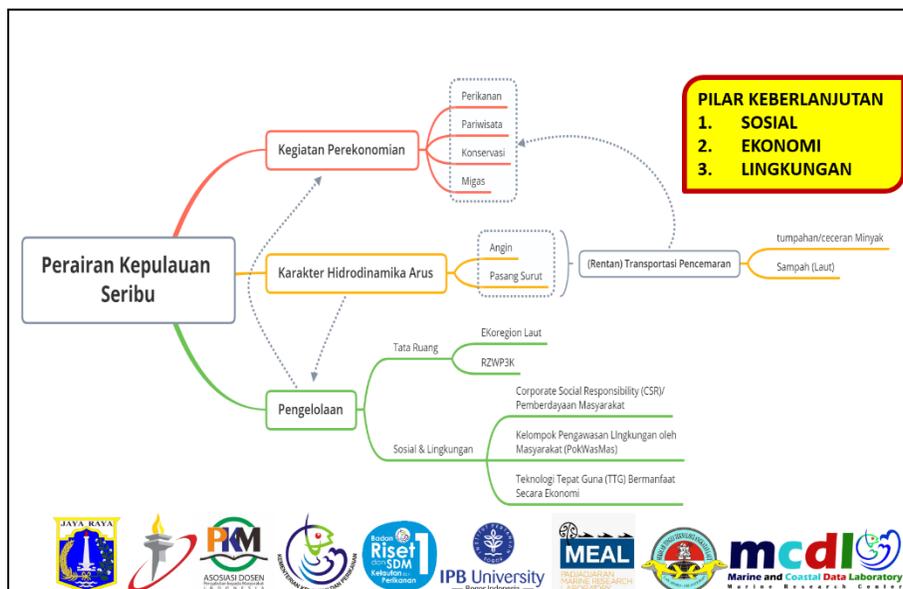
Tembusan :

1. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
2. Ka.UPT Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan Bappeda Provinsi DKI Jakarta

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) TA. 2021
WEBMINAR (SEMINAR ONLINE) PENINGKATAN PELAYANAN DI KEPULAUAN
SERIBU**

PENDAHULUAN

Dewan Riset Daerah (DRD) DKI Jakarta periode 2018-2022 pada Tahun Anggaran 2020 telah sukses menyelenggarakan SEMINAR ONLINE bertajuk “Kolaborasi Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dosen Perguruan Tinggi Dalam Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan Seribu” yang dilaksanakan pada 23 Desember 2020. Bupati Kepulauan Seribu, Bapak Junaedi S.Sos, MSi, pada Seminar Online tersebut menyampaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu yang bisa dikatakan masih tertinggal, dibandingkan dengan masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta secara umum. Ada banyak permasalahan yang terjadi di Kepulauan Seribu, baik isu lingkungan, sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut, menurut Heru Susetyo, S.H., L.L.M, Ph.D selaku anggota Komisi I DRD, merupakan suatu tantangan dan sekaligus peluang bagi DRD dan para kolaboratornya untuk berusaha membangun ekosistem kebijakan yang dapat dipergunakan guna percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu, melalui pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi, harus didasarkan kepada potensi daya dukung dan daya tampung sumber daya alam laut dan pesisir, serta mempertimbangkan adanya kerentanan dari pencemaran, seperti yang dipaparkan oleh Dr.-Ing. Widodo S. Pranowo yang salah satu anggota Komisi I DRD DKI Jakarta. Pembangunan lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu, tidak bisa hanya dikerjakan oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Seribu saja, melainkan perlu dukungan kolaborasi berbagai pihak, salah satunya adalah Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Indonesia (ADPI) cabang DKI Jakarta, seperti yang disampaikan oleh Dr. Nur Aini selaku Bendahara ADPI dan Dosen ITB Ahmad Dahlan. Resume dan rekomendasi dari seminar online tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Resume dan rekomendasi dari Seminar Online DRD DKI Jakarta pada 23 Desember 2020

Berdasarkan capaian SEMINAR ONLINE pada tahun 2020 tersebut, maka perlu ditindaklanjuti dengan SEMINAR ONLINE (WEBMINAR) lanjutan untuk menajamkan pembahasan salah satu aspek yang penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu. Seminar online (Webminar) lanjutan yang diusulkan untuk diselenggarakan pada Tahun Anggaran 2021 ini adalah membahas tentang “Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu”.

MAKSUD

Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi DKI Jakarta, pada Tahun Anggaran 2021, bermaksud untuk menyelenggarakan Seminar online (Webminar) tentang “Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu”. Webminar ini memiliki fungsi yang sangat strategis antara lain: sebagai media pengumpul data dan informasi dari narasumber yang terpercaya; sebagai media diskusi public yang terakuntabilitas; sebagai salah satu media

diskusi ilmiah dalam rangka proses penyusunan Policy Brief yang akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan juga sebagai media *public outreach* hasil riset DRD DKI Jakarta kepada masyarakat.

TUJUAN

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Menyelenggarakan Seminar Online (Webminar) tentang Peningkatan Pelayanan di Kepulauan Seribu.
2. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan Seminar Online (Webminar) tersebut sebagai salah satu bahan masukan untuk penyusunan Policy Brief Besar yang sedang disusun oleh DRD DKI Jakarta tentang kebijakan pembangunan lingkungan-sosial-ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Seribu.

TARGET NARASUMBER

Adapun yang ditargetkan menjadi Narasumber adalah:

1. Perwakilan dari Pemda Kabupaten Kepulauan Seribu yang membidangi pelayanan publik: untuk Kesejahteraan masyarakat, dan Penanaman Modal.
2. Anggota DRD DKI Jakarta yang membidangi kebijakan/hukum tentang pelayanan publik.
3. Peneliti dan/atau Akademisi Perguruan Tinggi yang membidangi peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil.

TARGET PESERTA

Adapun jumlah peserta Seminar Online (Webminar) minimal adalah 100 peserta yang terdiri dari masyarakat umum, LSM, peneliti, akademisi yang memiliki perhatian positif kepada Kepulauan Seribu; staf pemangku kebijakan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta dan kabupaten Kepulauan Seribu.

RENCANA JADWAL

Adapun Seminar Online (Webminar) rencana diselenggarakan pada 23 Desember 2021 dengan rencana jadwal sebagai berikut:

WAKTU [WIB]	KEGIATAN	PIC/NARASUMBER
12.55 – 13.00	Peserta dan Narasumber memasuki waiting room zoom yang terpisah.	PIC: Panitia
13.00 – 13.20	Peserta dan Narasumber memasuki main room zoom seminar online.	PIC: Panitia dan Pembawa Acara
SESI I: SAMBUTAN-SAMBUTAN		
13.20 – 13.30	Sambutan dari Ketua DRD DKI Jakarta	Prof. Dr. Ir. Kemas Ridwan, M.Sc
13.30 – 14.00	Sambutan dari Bupati Kepulauan Seribu/ yang mewakili	Bapak. JUNAEDI, S.Sos, M.Si
14.00 – 14.10	Foto Bersama	
SESI II: PELAYANAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KEPULAUAN SERIBU		
14.10 – 14.40	Pelayanan public untuk kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Seribu	Perwakilan dari Pemkab Kepulauan Seribu
14.40 – 15.10	Pelayanan penanaman modal di Kepulauan Seribu	Perwakilan dari Pemkab Kepulauan Seribu
15.10 – 15.40	Pelayanan Publik/ Penanaman Modal di Kepulauan Seribu ditinjau secara akademis	Akademisi/ Peneliti
15.40 – 16.10	Kebijakan/hukum tentang pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta dan/atau Kepulauan Seribu	Anggota DRD DKI Jakarta
SESI III: DISKUSI, WRAP UP DAN PENUTUP		
16.10 – 16.45	Diskusi	
16.45 – 17.00	Wrap Up dan Penutup	Ketua Komisi I DRD DKI Jakarta

Junaedi (birokrat)

Junaedi, S.Sos, M.Si (lahir 5 Desember 1966) adalah Bupati Kepulauan Seribu yang menjabat sejak 4 September 2020.^[1] Sebelum menduduki jabatan tersebut, Junaedi pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Administrasi Kepulauan Seribu sejak tahun 2018^[2] hingga tahun 2020^[1] dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara sejak tahun 2017 hingga tahun 2018.^[3]

Daftar isi

Riwayat Pendidikan

Riwayat Pekerjaan

Referensi

Pranala luar

Riwayat Pendidikan

- S-1 STIA Yappann (1992)
- S-2 Universitas Padjadjaran (2005)

Riwayat Pekerjaan

- Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Tahun 2015-2016
- Asisten Deputi Bidang Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2016-2017
- Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Tahun 2017-2018
- Wakil Bupati Administrasi Kepulauan Seribu, Tahun 2018-2020
- Bupati Administrasi Kepulauan Seribu, Tahun 2020-sekarang^[1]

Referensi

- "Gubernur Provinsi DKI Jakarta Lantik Bupati Kepulauan Seribu". Pemerintah Kepulauan Seribu. 4 September 2020. Diakses tanggal 7 September 2020.
- "Anies Lantik 2 Wakil Walikota dan 1 Wakil Bupati". *rmoljakarta.com*. 25 September 2018. Diakses tanggal 1 Mei 2020.
- "Djarot Lantik 18 Pejabat Eselon II". *Berita Satu*. 13 Juli 2017. Diakses tanggal 1 Mei 2020.

Pranala luar

Junaedi

S.Sos, M.Si



Bupati Kepulauan Seribu ke-11

Petahana

Mulai menjabat

4 September 2020^[1]

(Pelaksana Tugas: 27 Juli – 4 September 2020)

Presiden Joko Widodo

Gubernur Anies Baswedan

Wakil M. Fadjar Churniawan
(sejak 2021)

Pendahulu Husein Murad

Wakil Bupati Administrasi Kepulauan Seribu

Masa jabatan

25 September 2018 – 4 September 2020

Presiden Joko Widodo

Gubernur Anies Baswedan

Bupati Husein Murad

Pendahulu Ismer Harahap

Pengganti M. Fadjar Churniawan

Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara

Masa jabatan

13 Juli 2017 – 25 September 2018

Presiden Joko Widodo

Gubernur Djarot Saiful Hidayat
 Anies Baswedan

Wali Kota Husein Murad
 Syamsudin Lologau

Pendahulu Yani Wahyu Purwoko

Pengganti	<u>Ali Maulana Hakim</u>
Informasi pribadi	
Lahir	5 Desember 1966 <u>Brebes, Jawa Tengah</u>
Kebangsaan	 <u>Indonesia</u>
Almamater	<u>Institut Ilmu Pemerintahan</u> <u>Universitas Padjadjaran</u>
Profesi	<u>birokrat</u>

Jabatan pemerintahan		
Didahului oleh: <u>Husein Murad</u>	<u>Bupati Administratif Kepulauan Seribu</u> 4 September 2020–sekarang	Petahana
Didahului oleh: <u>Ismer Harahap</u>	<u>Wakil Bupati Administrasi Kepulauan Seribu</u> 2018-2020	Diteruskan oleh: <i>Lowong</i>

Diperoleh dari "[https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Junaedi_\(birokrat\)&oldid=19395983](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Junaedi_(birokrat)&oldid=19395983)"

Halaman ini terakhir diubah pada 12 November 2021, pukul 00.38.

Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya.

RIWAYAT HIDUP

Dr. Ir. A. H. Rahadian, M.Si, dilahirkan di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 19 April 1947, berpendidikan Sarjana Teknologi Hasil Pertanian (dengan minat utama Teknologi Pangan) Institut Pertanian Bogor tahun 1974. Kemudian memperoleh Magister Ilmu Pemerintahan pada Universitas Satyagama, Jakarta pada tahun 2000 dan Doktor Ilmu Sosial dengan kekhususan Kebijakan Publik pada tahun 2005 dari Universitas Padjadjaran, dengan disertasi berjudul *Pengaruh Implementasi Kebijakan Penyuluhan Pertanian Terhadap Kemandirian Kelompok-Tani Melalui Produktifitas Penyuluhan*.

Sejak tahun 1977 meniti karir di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian dan pada tahun 2000-2005 memangku jabatan Inspektur Jenderal Departemen Pertanian. Pada tahun 2001 selain menjabat Inspektur Jenderal berturut-turut merangkap pula sebagai Plt Kepala Badan Karantina Pertanian dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian a.i.

Selain itu, pada tahun 2000-2006 menjabat Komisaris/Komisaris Utama PT Duta Karya Swasta Penerbit Tabloid Sinar Tani dan jabatan Komisaris di embannya kembali sejak tahun 2012-saat ini. Kemudian pada tahun 2003-2008 menjabat Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara XII (Persero).

Pada tahun 2005 oleh Koordinator Kopertis Wilayah III diangkat sebagai lektor pada mata kuliah Kebijakan Publik, Manajemen Publik, Manajemen Pelayanan Publik. Selanjutnya, sejak tahun 2006 beralih tugas sebagai PNS Kopertis Wilayah III Depdiknas yang dipekerjakan pada STIAM, Jakarta.

Di bidang ilmu pengetahuan dan kemasyarakatan, penulis aktif sebagai anggota Dewan Pembina Yayasan Kybernologi Indonesia sejak 2006 dan pada tahun 2010 menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Masyarakat Kybernologi Indonesia (MKI), sebuah organisasi profesi para pembelajar kybernologi (ilmu pemerintahan paradigma baru). Kemudian berdasarkan Munas VII HKTI, penulis ditetapkan sebagai Anggota Badan Pertimbangan Organisasi DPN-HKTI 2010 – 2015.

Karya-karya ilmiah penulis, sejak tahun 2006 dimuat di berbagai jurnal, yaitu *International Journal of Kybernologi*, Jurnal Transparansi dan Jurnal Bijak.

Dua buah buku yang telah diterbitkan adalah: yang pertama, Menuju ke Pemikiran: Kybernologi Pertanian dan Agro-Pemerintahan (Sirao Credentia Center, 2009) ditulis bersama Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha dan Dr. Ir. Abdul Samad Melleng. Dan buku keduanya, Manajemen Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam Perspektif Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Paradigma Baru) (PT. Duta Karya Swasta, 2010) dan pada tahun 2021 telah terbit dua buku yaitu Manajemen Strategis Sektor Publik dan Manajemen Publik Era Digital.

CURRICULUM VITAE

Nama : Drs. H. Teguh Iman Perdana, MIP
Tempat/tgl lahir : Tangerang, 2 Desember 1967
Alamat : Jl. Tebet Timur III N no. 13, Jakarta 12820
HP : **0821 1028 1969**
email : teguhfriend@gmail.com

Riwayat pendidikan:

1980 Tamat Sekolah Dasar Kebon Sirih 01 Pagi
1984 Tamat SMP Negeri 1 Jakarta
1986 Tamat SMA Negeri 4 Jakarta
1993: menyelesaikan sarjana Ilmu Politik FISIP UI
2012: menyelesaikan magister Ilmu Politik Pascapol UI

Pengalaman organisasi

- Wakil ketua Seksi Rohani Islam SMU 4 1984-1985,
- Ketua mushalla FISIP UI periode 1988-1989.

Bahasa aktif: Indonesia, Inggris (lisan dan tulisan), Sunda.

TOEFL score (based on 2009 test): 540

Penguasaan komputer meliputi program Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Aktifitas profesional

- *Associated instructor & trainer* pada PPSDM Consultant (penekanan pada materi seputar "Spiritualitas Dalam Dunia Kerja" serta "Mindset Change")
- *Associated instructor & trainer* pada Lembaga Pendidikan Ratih Sang (dengan penekanan materi seputar "Mindset Change" dan "The Best of Me").

- *Trainer, public speaker* pada berbagai ceramah, seminar dan workshop dengan klien-klien diantaranya Pocari Sweat, Bayer, Coca Cola Bottling, Bumi Asih Jaya, Tempo Scan Pasific, Exxson Mobile, Aetra (d/h Palyja), Taspen, TransTol, Euro Management, Lemtek FT UI, PT. Antam, Bank BTN, Bank BRI, berbagai ormas dan organisasi sosial/profesional, sekolah dan perguruan tinggi (FISIP UI, FH UI, F Psy UI, F MIPA UI, Univ. Hang Tuah, Surabaya, Karisma Salman, Bandung, dan sebagainya).
- Motivator pada sesi khusus menjelang ujian nasional pada SMP N 1 Jakarta (2012, 2013),
- Motivator peserta Olympiade Biologi tingkat SMP DKI Jakarta 2013,
- Motivator pada *event* "Konferensi Penulis Cilik Indonesia" 2012 dan 2013.
- Pengisi taushiah bagi sekolah, kampus dan rumah sakit dalam rangka "Safari Ramadhan Pocari Sweat", 1434 dan 1435 H.
- *Associated consultant* pada Cirus Surveyor Group (dibawah pimpinan bapak Andrinof A. Chaniago, Ketua Bappenas/Menteri PPN 2015 era presiden Joko Widodo).
- Anggota tim kajian "Gerakan Bersama Pemerintah, Pengusaha, dan LSM untuk Membangun dan Menjaga Fasilitas Mengantri, Kebersihan, Kenyamanan, dan Keamanan di Ruang Publik", Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, November 2015 – Februari 2016.
- Pengisi program "AlQur'an dan Science" radio Silaturahmi 720 AM, 2013 – sekarang.
- Pengisi kajian "AlQur'an dan Science" masjid al Huda, Tebet Timur, 2014 – sekarang.
- Pembicara tetap pada forum pengajian Alumni SMP 3 Angkatan 75, 2015 – sekarang.
- Guru tamu pada SMP dan SMA "Lazuardi Global Islamic School".
- Koordinator aksi sosial "Indonesia Maju Bersama" dibawah supervisi Bapak Andrinof Chaniago.

Pengalaman kerja

1990 – 1999, produser acara “Obrolan Puasa” (Opus), radio Prambors Jakarta,

1992 – 1993, *programmer* Dakta FM, Bekasi,

1993 – 1994, Program Director/Operation Manager Delta FM Jakarta

1995 – 1997, *product officer* hingga *media buyer* PT Radionet Cipta Karya,

1997 – 1999, *managing director* Yayasan Swarna Bhumi.

1995 – sekarang, mendirikan dan menjalankan PT Indosuci Baraka Perdana (perusahaan distribusi).

Januari – Juli 2010, Tenaga Ahli Anggota DPR RI A-355, Tb. Dedy S. Gumelar

2011 – 2012, staf khusus direksi Smart FM network.

2012 – 2013, VP Product Innovation Smart FM network

Januari - Agustus 2014, *on line & web manager* Radio Smart FM.

September 2014 – Oktober 2017, *head of promotion and strategic alliance* PT. Bumi Raya Property, dengan penekanan khusus pada tanggung jawab pembentukan zona “Planet Haji Umrah”, bertanggung jawab atas media sosial perusahaan khususnya pemeliharaan dan pengembangan website www.planethajiumrah.com (note: website sudah tidak aktif).

Mei – Oktober 2018, mentor pada tim IKKON (**I**novatif **K**reatif untuk **K**olaborasi **N**usantara) dari Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) dengan daerah penugasan kabupaten Wakatobi.

Juli 2019, mendirikan PT. Fastindo Mitra Sukses, perusahaan yang bergerak dalam pengembangan SDM, periklanan dan perdagangan.

September 2020 – sekarang, menjadi *announcer* program “Afternoon Brief” Airmen Radio 107,9 FM (www.radioairmenfm.com), stasiun radio dibawah Dinas Penerangan TNI AU.

April 2021 – sekarang menjadi *content provider* pada website www.partnership-id.com .

Penulis buku

- "Ngefriend Sama Islam track # 1" (2002)
- "Ngefriend Sama Islam track # 2" (2002)
- "Ngefriend Sama Islam track #3" (2004)
- "Ngefriend Sama Islam track #4" (2005)
- "Ngefriend Sama Islam track # 5" (2006)
- "Ngefriend Sama Islam track # 6"(2007)
- "Ngefriend Sama Islam track # 7" (2008)
- "Ngefriend Sama Cinta" (2006)
- "Butik Cik Ling-Ling" (kumpulan cerpen, 2004)
- "Ngapain Loe, Bunga?" (novel, 2005).
- "Indahnya Nikah Tanpa Pacaran" (kumpulan tulisan, 2006)
- "Menemukan Sekolah Yang Membebaskan", (ed., Komunitas Sekolah Alam, 2005).
- "Remaja Bau Syurga: *Hang Out* Bareng Orang Soleh" (2008),
- "Cewek Boleh Gak Berjilbab!"(2008)
- "Scream Free Parenting" (Februari 2012).
- "Indonesia Tanpa Liberalisme" (kumpulan tulisan, 2013)
- "Terbukti Bisa!" (diangkat dari tesis magister politik UI, Maret 2013)
- "Tobat Keren dan Dahsyat (Kisah Ust. Jeffry Albuchori)" (Mei 2013)
- "Don't Give Up" (Juni 2013)
- "Penyegar Jiwa" (bunga rampai kisah inspiratif, 2014)
- "Mukjizat Orang Tua Sempurnakan Suksesmu" (bersama ust. Ahmad Alhabsy), Juni 2014.

Note: informasi keberadaan beberapa buku ini dapat dilihat lewat google dengan kata kunci 'buku Teguh Iman Perdana'.

Presenter/nara sumberTV

- "Indonesia Berdzikir" Trans TV,
- "Ramadhan Kita", TV cable Astro Channel
- "Santrizone" SpaceToon
- "Café Soleh" RCTI.
- "Kata Ustadz Solmed" SCTV

Konsultan dan konseptor komunikasi

- "Yuk Sahur Yuk" (Trans TV, 2002),
- "Mi'ing Café" (TVRI, 2002)
- "Cafe Pajak" (TVRI, 2002-2003),

- "City View" (Jak TV, September 2007 - September 2008)
- Timses kampanye calon walikota Tangerang 2013 (a/n Tb. Dedy Gumelar)
- Konsultan media radio Bawaslu RI (2014)

Kelebihan pribadi yang dapat diringkas adalah:

- Menguasai kemampuan tulis menulis dengan baik, terbukti dari lk. 20 buku yang telah dihasilkan. Buku-buku tersebut dapat dilihat pada *google search* dengan kata kunci "buku Teguh Iman Perdana"
- Komunikasi / Human & Public Relation, termasuk membangun dan mengembangkan *networking* antar elemen masyarakat, dari sosial, politik hingga ekonomi (UMKM)
- Memiliki kemampuan *public speaking* amat baik, baik sebagai presenter [host pada program "Convey Indonesia"] moderator, trainer/motivator (*associated trainer* pada LPRS [Lembaga Pelatihan Ratih Sang] hingga penceramah keagamaan.
- Membuat dan mengembangkan konsep komunikasi bisnis dan marketing (proposal hingga SOP dan eksekusi), dengan contoh kasus membangun kawasan "Planet Haji Umrah" di Thamrin City lantai 3A.
- Memahami dan menjadi praktisi dunia media, baik elektronik (konseptor acara TV, konseptor dan pelaksana program radio, mulai dari *project officer* di radio Prambors, *programmer* Dakta FM, PD/OM Delta FM, VP Programme Smart FM, narasumber Rasil AM hingga Megaswara FM), online (editor dan supervisor *content provider* pada www.planethajiumrah serta www.partnership-id.com) dan off air (melakukan fungsi *event organizer* di PT. Bumi Raya Property)
- Memahami dunia periklanan, khususnya radio (pernah menjadi *media buyer* di Radionet Cipta Karya, VP programme di radio Smart FM network)
- Wawasan sosial dan politik yang cukup mumpuni (pernah menjadi tenaga ahli DPR RI, anggota tim riset CIRUS Survey Group, anggota tim kajian Depdagri dari konsultan komunikasi "Bamboe Doea").
- Memahami dunia pariwisata Indonesia dan pengembangan konten beserta hal-hal pendukungnya, lewat jabatan mentor pada program IKKON (**I**novatif **K**reatif untuk **K**olaborasi **N**usantara) dari Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif RI) pada daerah penempatan kabupaten Wakatobi pada 2018.

Referensi:

Erna Witoelar (+62 816-1850-447)

Ratih Sanggarwati (081808070302)

Andrinof Chaniago, MSi (0811 848554)

Demikian CV ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 31 Juli 2021.

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, enclosed in a blue rectangular border. The signature is stylized and appears to read 'Teguh Iman Perdana'.

Teguh Iman Perdana, M.I.P.

0821 1028 1969

Email & Facebook: teguhfriend@gmail.com

Website: www.partnership-id.com

Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA

Jabatan : Anggota DRD (Pasif)

Bidang Ilmu :

1. S3 Fisip Ilmu Pemerintahan - Universitas Padjadjaran, Bandung
2. S2 Development Economics at Denver, USA
3. S1 Ekonomi Studi Pembangunan - UNPAD Bandung

Bidang Kepakaran

1. Perencanaan Pembangunan
2. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
3. Governance

Lembaga Non DRD Aktif

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Email : dangsol.drd@jakarta.go.id (mailto:dangsol.drd@jakarta.go.id)

